



**INDEKS WILLIAMSON KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2010 - 2017**



Oleh:

Dr. Sri Suharsih, SE, MSi
Asih Sri Winarti, SE, MSi
Astuti Rahayu SE,MSi

**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI (DISKOMINFO)
KABUPATEN SLEMAN
DESEMBER 2018**

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II Kajian Pustaka	10
Bab III Metodologi Penelitian	16
Bab IV Analisis dan Pembahasan	18
Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi	66
Daftar Pustaka	69
Lampiran	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan tidak hanya berhubungan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, namun perlu memperhatikan asas pemerataan dan keberlanjutan, sehingga tujuan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dapat tercapai. Kenyataan menunjukkan pembangunan yang dilakukan selama ini menjadikan laju pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama dan mengabaikan esensi kesejahteraan itu sendiri, yakni pemerataan antara wilayah dan distribusi spasial atas sumber daya.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi, karena variabel ini dapat mudah diukur secara kuantitatif. Ekonomi dikatakan tumbuh jika terdapat kenaikan pendapatan (total maupun individu) sebagai akibat meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto dengan mengabaikan kenaikan yang terjadi pada jumlah penduduk, tidak memandang apakah terjadi perubahan struktur ekonomi atau penurunan ketimpangan ekonomi (antar wilayah, masyarakat, dan antar sektor).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menjamin terciptanya pemerataan pendapatan antar individu dan wilayah. Bahkan seringkali pertumbuhan ekonomi dibarengi dengan adanya ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan yang paling jelas terlihat adalah pada aspek pendapatan yang menimbulkan golongan kaya dan miskin, aspek spasial yang menimbulkan adanya wilayah maju dan tertinggal serta aspek sektoral yang menimbulkan adanya sektor unggulan dan non unggulan.

Ketidakmerataan pembangunan secara spasial menimbulkan ketimpangan pada pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Beberapa daerah mengalami pertumbuhan secara cepat dan beberapa daerah lainnya pertumbuhannya relatif lambat. Perbedaan kemajuan ekonomi

suatu daerah dengan daerah lainnya disebabkan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki oleh daerah-daerah tersebut serta adanya kecenderungan penanaman modal oleh para investor pada daerah-daerah yang telah memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang lebih lengkap dan sumber daya manusia yang terampil, yang umumnya terdapat pada pusat-pusat pemerintahan/kota. Perbedaan pertumbuhan ekonomi antar wilayah juga disebabkan adanya ketimpangan redistribusi pendapatan dari pemerintah pusat ke daerah. Pendekatan pembangunan yang menekankan pada percepatan pertumbuhan ekonomi selama ini juga mengakibatkan melebarnya ketimpangan sosial-ekonomi antar wilayah. Hal ini mengakibatkan terciptanya konflik antar wilayah yang semakin besar.

Faktor-faktor penyebab terjadinya ketimpangan ekonomi antar wilayah adalah 1) konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah, 2) alokasi investasi yang tidak merata sebagai akibat dari timpangnya ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia, 3) tingkat mobilitas faktor produksi (tenaga kerja, modal) yang lemah antar wilayah, dan 4) perbedaan sumber daya alam. Dasar pemikiran “klasik” sering mengatakan bahwa pembangunan ekonomi di daerah yang kaya sumber daya alamnya akan lebih maju masyarakatnya dan lebih maju dibandingkan daerah yang miskin sumber daya alam.

Laju pertumbuhan ekonomi Kecamatan di Kabupaten Sleman atas dasar harga konstan pada periode 2011 - 2016 dapat dilihat pada Tabel 1.1. berikut:

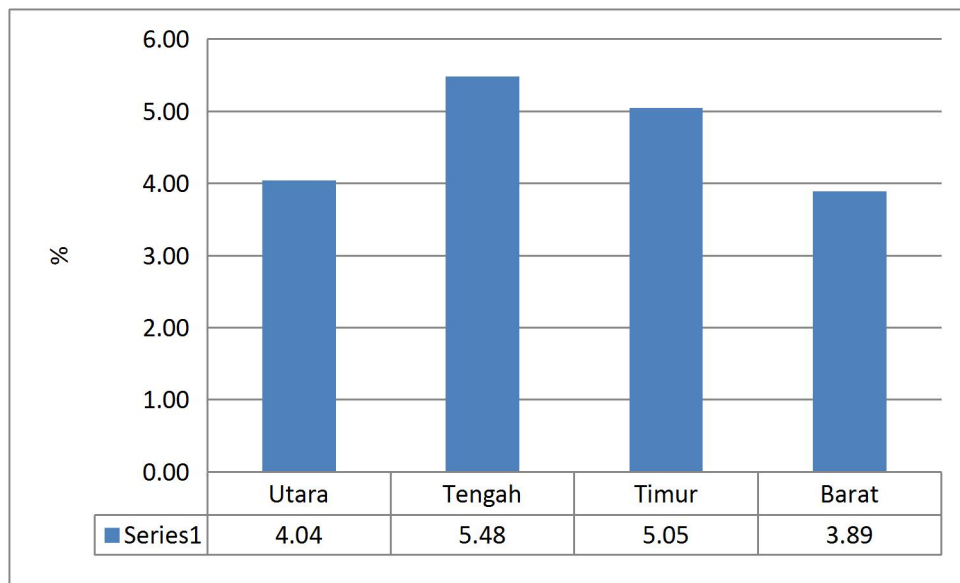
**Tabel 1.1. Rerata Pertumbuhan Ekonomi Kecamatan
Tahun 2011- 2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010**

No	Kecamatan	Rerata Pertumbuhan Ekonomi (%)
1	Moyudan	3.37
2	Minggir	4.31
3	Seyegan	4.54
4	Godean	2.53
5	Gamping	5.84
6	Mlati	5.50
7	Depok	6.92
8	Berbah	4.91
9	Prambanan	5.23
10	Kalasan	5.02
11	Ngemplak	3.54
12	Ngaglik	5.47
13	Sleman	5.64
14	Tempel	3.83
15	Turi	3.85
16	Pakem	3.94
17	Cangkringan	4.52
Rata-rata		4.64

Sumber : BPS 2017, diolah

Dari Tabel 1.1. tersebut terlihat bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Depok adalah yang tertinggi dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi kecamatan lain di Kabupaten Sleman, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi untuk periode 2011-2016 sebesar 6,92 persen. Sedangkan Kecamatan Godean merupakan kecamatan dengan laju pertumbuhan ekonomi terendah di Kabupaten Sleman, dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi selama 2011-2016 sebesar 2.53 persen.

Selanjutnya bila mengacu pada karakteristik sumber daya yang ada, wilayah di Kabupaten Sleman dibagi menjadi 4 kawasan, yaitu Kawasan lereng Gunung Merapi (Utara), Kawasan Timur, Kawasan Tengah (Kawasan Perkotaan Yogyakarta) dan Kawasan Barat. Laju pertumbuhan ekonomi di keempat kawasan tersebut untuk periode 2011-2017 dapat dilihat pada Gambar 1.1. sebagai berikut:



Sumber: BPS 2017, diolah

Gambar 1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kawasan di Kabupaten Sleman Tahun 2011- 2016 Atas Dasar Harga Konstan 2010

Dari Gambar 1.1. tersebut terlihat bahwa Kawasan Tengah yang merupakan wilayah aglomerasi Kota Yogya yang menjadi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa merupakan kawasan dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sleman (rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5.48 persen). Tabel 1.1 dan Gambar 1.1, menunjukkan bahwa terlihat adanya perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar kecamatan dan perbedaan laju pertumbuhan ekonomi antar kawasan.

Pengurangan kesenjangan antar kecamatan/kawasan di Kabupaten Sleman merupakan salah satu sasaran yang ingin dicapai pemerintah

Kabupaten Sleman pada tahun 2025. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2006-2025 mengamanatkan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman berada pada angka $\pm 0,03$. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, tentunya perlu diketahui besaran ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Sleman pada saat ini untuk selanjutnya disusun strategi dan arah kebijakan yang sesuai dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, potensi dan tantangan yang ada di masing-masing wilayah.

1.2. Tujuan Kegiatan

Tujuan kajian ini adalah:

1. Mengetahui seberapa besar ketimpangan ekonomi antar wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman;
2. Menganalisis trend ketimpangan antar wilayah kecamatan untuk 5 tahun kedepan;
3. Menganalisis penyebab ketimpangan antar wilayah kecamatan dengan analisis sektoral;
4. Rekomendasi kebijakan terkait pengurangan angka ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai melalui penyusunan dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman adalah tersusunnya Buku Indeks Williamson yang dapat digunakan sebagai pedoman atau arah pengembangan wilayah di Kabupaten Sleman sebagai upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan.

1.4. Dasar Hukum

Dasar hukum dari kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Kawasan Strategis Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu;
17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2012-2017;
19. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029;
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Daerah Tahun 2015-2025.

1.5. Ruang Lingkup Analisis

1.5.1. Lingkup Spasial

Lingkup spasial dalam penyusunan dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman meliputi seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sleman.

1.5.2. Lingkup Waktu

Dokumen Analisis Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman digunakan untuk periode 7 (tujuh) tahun yaitu tahun 2011 – 2017.

1.6. Kerangka Penyusunan

Kerangka penyusunan laporan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bagian ini antara lain berisi mengenai latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, dasar hukum, ruang lingkup analisis, dan kerangka penyusunan

BAB II Tinjauan Teori

Bagian ini berisi mengenai teori pembangunan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah

BAB III Metodologi

Bagian ini berisi tentang metode penelitian yang dilakukan, data serta alat analisis yang digunakan

BAB IV Analisis Data

Bagian ini berisi analisis ketimpangan

BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bagian ini berisi kesimpulan dan strategi kebijakan terkait Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Wilayah di Kabupaten Sleman.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembangunan Ekonomi

Menurut Todaro (2006) proses pembangunan paling tidak memiliki tiga tujuan inti, yaitu: 1) peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup yang pokok; 2) peningkatan standar hidup; dan 3) perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial. Menurut Meier (dalam Arsyad, 2002) pembangunan ekonomi merupakan suatu proses dimana pendapatan per kapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah “garis kemiskinan absolut” tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang merupakan kunci dalam melihat suatu pengertian pembangunan ekonomi.

Laju pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (*Gross Domestic Bruto* atau GDP). Apabila pertumbuhan GDP/GNP lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penduduk maka pendapatan per kapita akan tetap sama atau cenderung menurun. Ini berarti bahwa pertumbuhan GDP/GNP tidak memperbaiki tingkat kesejahteraan ekonomi.

2.2. Pembangunan Ekonomi Daerah

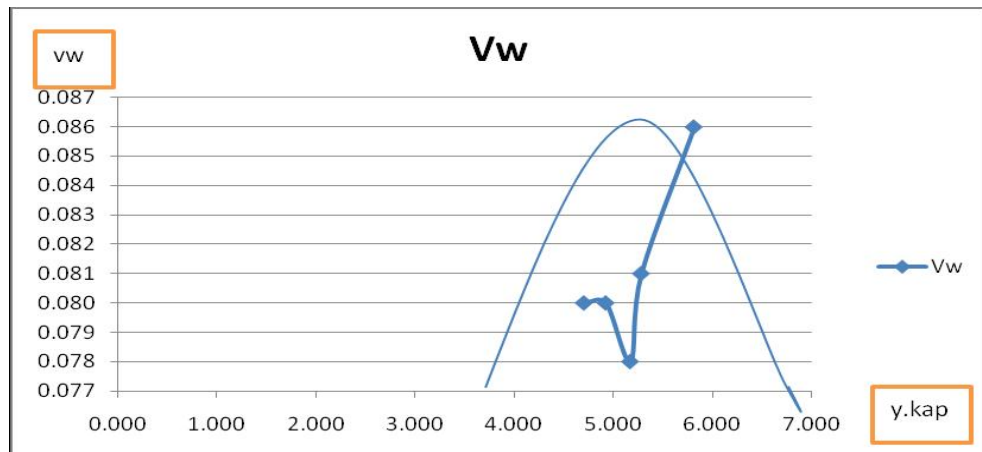
Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru (Arsyad, 2002). Dalam pembangunan ekonomi daerah diperlukan campur tangan pemerintah. Apabila pembangunan daerah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar maka pembangunan dan hasilnya tidak dapat dirasakan oleh seluruh daerah secara merata.

Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat kesejahteraan daerah. Memusatnya ekspansi ekonomi di suatu daerah disebabkan berbagai hal, misalnya kondisi dan situasi alamiah yang ada, letak geografis, dan sebagainya.

Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan, akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut seperti yang diungkapkan Myrdal dalam Jhingan (1993) mengenai dampak balik pada suatu daerah. Oleh karena itu, apabila proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah yang terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

2.3. Hipotesis Kuznets

Simon Kuznets dalam Kuncoro (2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*inverted U curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai maka distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu maka distribusi pendapatan akan merata. Menurut Kuznet pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan barang ekonomi kepada penduduknya.



Ket:

Vw: *Value of Wiliamson Index* (Indeks Williamson)

y/kap: Pendapatan perkapita

Gambar 2.1. Hipotesis U Terbalik Simon Kuznets

Simon Kuznet mengatakan bahwa tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, dan tahap selanjutnya distribusi pendapatannya akan membaik, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan disparitas lagi dan akhirnya menurun lagi. Hal tersebut tergambar dalam kurva Kuznet (gambar 2.1). Kurva Kuznet menunjukkan bahwa dalam jangka pendek ada korelasi positif antara pertumbuhan pendapatan perkapita dengan disparitas pendapatan, namun dalam jangka panjang hubungan keduanya menjadi berkorelasi negatif. Kuznet mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang ditemui hampir diseluruh negara maju, yaitu sebagai berikut :

1. Tingkat pertumbuhan output perkapita dan pertumbuhan penduduk yang tinggi;
2. Tingkat kenaikan produktifitas faktor total yang tinggi;
3. Tingkat transformasi struktural ekonomi yang tinggi;
4. Tingkat transformasi sosial dan ideologi yang tinggi;
5. Adanya kecenderungan negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.

2.4. Ketimpangan Antar Wilayah

Menurut Syafrizal (2012), ketimpangan yang terjadi antar wilayah disebabkan oleh perbedaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah, sehingga tiap daerah mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses pembangunan. Perbedaan wilayah ini yang menimbulkan adanya wilayah maju dan wilayah terbelakang. Menurut hipotesa Neo-Klasik, dalam proses pembangunan awalnya ketimpangan akan meningkat, proses ini akan terjadi hingga ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah mencapai titik puncak dan proses pembangunan masih terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan tersebut akan menurun. Ketimpangan antar wilayah dalam kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam proses pembangunan suatu daerah. Dengan adanya ketimpangan, maka akan mendorong daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas pembangunannya agar tidak tertinggal dengan daerah yang sudah maju. Selain dampak positif dari adanya ketimpangan dalam pembangunan, dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya ketimpangan pembangunan yaitu dengan adanya ketimpangan maka akan terjadi inefisiensi ekonomi, sehingga melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dianggap tidaklah adil (Todaro, 2006)

2.5. Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah

Menurut Arsyad (2010) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Hal ini merupakan salah satu pemicu terjadinya ketimpangan antar daerah.
2. Perbedaan kondisi demografis daerah yang berbeda. Mobilisasi jumlah penduduk yang berbeda ditambah dengan masifnya

pertumbuhan penduduk menjadi salah satu penyebab ketimpangan wilayah.

3. Ketidakmerataan pembangunan antar daerah;
4. Investasi yang banyak dilakukan pada proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga menambah jumlah pengangguran;
5. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa antar satu daerah dengan daerah lain.
6. Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang berbeda;
7. Perbedaan alokasi dana pembangunan antar daerah.

Sementara itu beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah menurut Sjafrizal (2012) yaitu :

1. Perbedaan kandungan sumber daya alam

Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.

2. Perbedaan kondisi demografis

Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan serta etos kerja yang

dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

3. Kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa

Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah

Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.

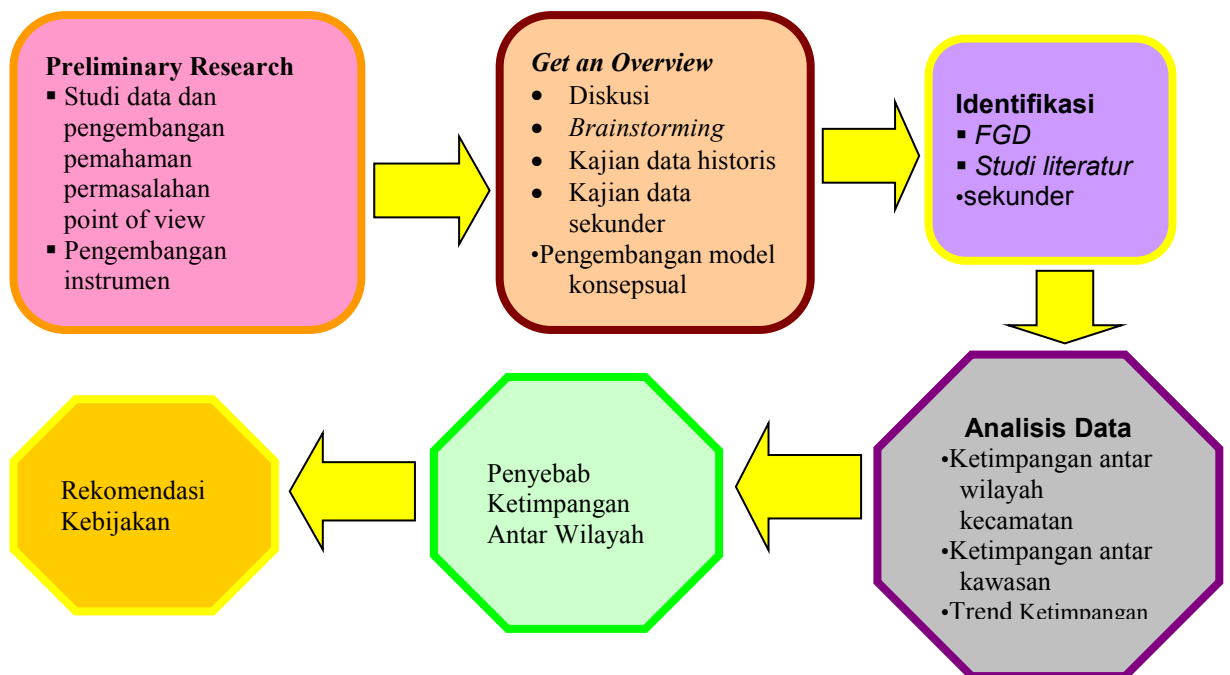
5. Alokasi dana pembangunan antar wilayah

Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta. Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah.

BAB III METODOLOGI

2.1. Pendekatan Kajian

Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan dan kerangka pikir seperti yang ditunjukkan pada bagan 3.1. Kegiatan ini diawali dengan *preliminary research*, yang meliputi studi data dan pengembangan pemahaman permasalahan untuk *point of view* dan pengembangan kajian. Dari *preliminary research* ini akan diperoleh *overview*. Setelah itu akan dilakukan pengumpulan data untuk menghitung besarnya ketimpangan antar wilayah kecamatan dan antar kawasan di Kabupaten Sleman. Dari hasil perhitungan besarnya angka ketimpangan antar wilayah tersebut dilakukan analisis trend untuk memperkirakan nilai ketimpangan antar wilayah kecamatan pada 5 (lima) tahun yang akan datang. Dari hasil analisis ketimpangan dilakukan analisis terhadap penyebab ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman dan selanjutnya berdasarkan hasil analisis dirumuskan rekomendasi kebijakan dan alternatif solusi dalam rangka pengurangan ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman.



Gambar 3.1. Pendekatan Kajian

2.1. Data dan Sumber Data

Tujuan penelitian ini akan dicapai dengan menggunakan data primer maupun data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui survei dan Observasi langsung (*direct observation*) serta studi laporan (*library research*). Data sekunder diperoleh dari beberapa penerbitan, antara lain dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan alasan ketidaktersediaan data PDRB perkecamatan pada tahun 2017, maka data PRDB perkecamatan pada tahun 2017 merupakan angka proyeksi

2.1. Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan penyusunan Analisis Ketimpangan Ekonomi antar Wilayah di Kabupaten Sleman, data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif kuantitatif dan kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengumpulan data sekunder terkait ketimpangan ekonomi antar wilayah yaitu data PDRB perkecamatan dan data jumlah penduduk;
2. Analisis deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang dianalisis menggunakan *Indeks Williamson*.

Tingkat ketimpangan antar wilayah dapat diketahui dengan menggunakan indeks ketimpangan regional (*regional inequality*) yang dinamakan indeks ketimpangan williamson.

$$I_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - Y)^2 \left(\frac{f_i}{n}\right)}}{Y}$$

I_w = Indeks Williamson

Y_i = PDRB perkapita daerah i

Y = PDRB perkapita rata-rata seluruh daerah

f_i = Jumlah penduduk daerah i

n = Jumlah penduduk seluruh daerah

BAB IV **ANALISIS DATA**

Untuk dapat menyusun arah strategi, kebijakan, program dan kegiatan terkait dengan ketimpangan perlu diketahui dan dianalisis mengenai besarnya ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Sleman, klasifikasi kecamatan kecamatan berdasarkan pertumbuhan ekonominya, dan faktor penyebab ketimpangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Sleman yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman.

4.1. Ketimpangan Ekonomi Antar Wilayah di Kabupaten Sleman

Besar kecilnya ketimpangan PDRB perkapita antar kecamatan memberikan gambaran tentang kondisi dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Sleman. Untuk memberikan gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Sleman, dilakukan analisis pemerataan PDRB perkapita antar Kecamatan dengan menggunakan indeks ketimpangan Williamson. Angka indeks ketimpangan Williamson yang semakin kecil atau mendekati nol menunjukkan ketimpangan yang semakin kecil atau dengan kata lain menunjukkan kondisi merata, dan bila semakin jauh dari nol menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Perhitungan Indeks ketimpangan Williamson ditunjukkan oleh tabel 4.1 sebagai berikut.

Tabel 4.1 menunjukkan angka indeks ketimpangan PDRB perkapita antar Kecamatan di Kabupaten Sleman selama periode 2011 – 2017 yaitu dengan rata-rata 0,42. Dapat dilihat bahwa pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 5.89%, dengan ketimpangan sebesar 0,38. Hal ini dapat diartikan bahwa salah satu penyebab terjadinya ketimpangan kawasan dimungkinkan karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat.

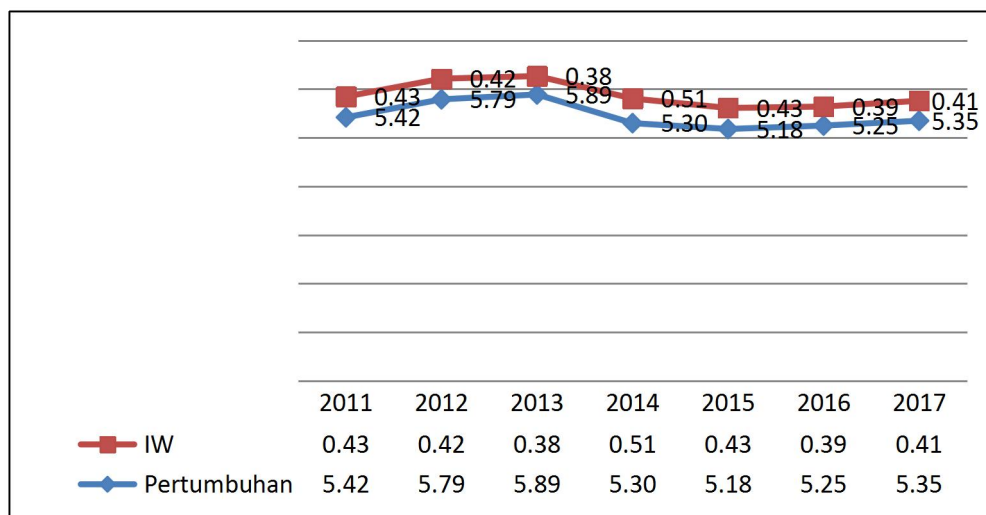
Tabel 4.1. Pertumbuhan dan Indeks Williamson Kabupaten Sleman, 2011 – 2017

Tahun	Pertumbuhan	Indeks Williamson
--------------	--------------------	--------------------------

2011	5.42	0.43
2012	5.79	0.42
2013	5.89	0.38
2014	5.30	0.51
2015	5.18	0.43
2016	5.25	0.39
2017	5.35	0.41
Rerata	5.45	0.42

*Tahun 2017 : angka proyeksi; hasil analisis 2018

Ketimpangan dan pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten Sleman dari tahun 2011 – 2017 memiliki kecenderungan meningkat, Nilai Indeks Williamson selalu mengalami kenaikan dengan rata rata 0,005 per tahun. Kecenderungan peningkatan ketimpangan dapat dilihat pada gambar 4.1.



Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.1. Pertumbuhan dan Indeks Williamson Kabupaten Sleman, 2011-2017

4.1.1. Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Sleman

Untuk memberikan gambaran gambaran yang lebih baik tentang kondisi dan perkembangan pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Sleman, berikut ini disampaikan analisis pemerataan PDRB perkapita antar kecamatan di Kabupaten Sleman dengan menggunakan Indeks

Ketimpangan Williamson yang ditunjukkan oleh tabel 4.2. sebagai berikut.

Tabel 4.2. Rerata Pertumbuhan, Indeks Williamson Per Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sleman, 2011 – 2017

No	Kecamatan	Rerata Laju PDRB (%)	Rerata IW
1	Moyudan	3.80	0.0139
2	Minggir	5.02	0.0109
3	Seyegan	4.85	0.0191
4	Godean	1.65	0.0313
5	Gamping	4.79	0.0423
6	Mlati	4.42	0.0487
7	Depok	6.79	0.0212
8	Berbah	4.10	0.0508
9	Prambanan	4.61	0.0439
10	Kalasan	4.20	0.0221
11	Ngemplak	2.94	0.0392
12	Ngaglik	4.40	0.3005
13	Sleman	4.79	0.2016
14	Tempel	4.17	0.0439
15	Turi	4.31	0.0770
16	Pakem	3.09	0.0583
17	Cangkringan	4.67	0.1229
Kabupaten Sleman		5.46	0.4452

Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa secara rerata dari tahun 2011-2017, tiga kecamatan dengan ketimpangan tertinggi yaitu Kecamatan Ngaglik, Sleman, dan Cangkringan. Kecamatan Ngaglik dan Sleman merupakan kecamatan yang berada di kawasan tengah Kabupaten Sleman atau sering juga disebut kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY), sehingga sangat memungkinkan angka ketimpangan di dua kecamatan tersebut tinggi. Sedangkan kecamatan Cangkringan adalah kecamatan yang berada di kawasan utara Kabupaten Sleman dengan tingkat pendapatan rendah, sehingga ketimpanganpun cukup tinggi.

4.1.2. Ketimpangan antar Kawasan di Kabupaten Sleman

Kawasan pengembangan sesuai dengan RT/RW Kabupaten Sleman terbagi menjadi 4 Kawasan sebagai berikut :

1. Kawasan Utara (Kawasan Lereng Gunung Merapi)

Kawasan ini merupakan penyangga air bersih di Kabupaten Sleman dan Kota Jogja. Di kawasan ini terdapat ratusan mata air. Kawasan ini tepat untuk investasi di bidang produksi air mineral, eko wisata, jasa kuliner, wisata agro, budidaya agrobisnis, wisata pedesaan, dan lain – lain. Kawasan utara terdiri dari Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan.

2. Kawasan Timur

Kawasan ini meliputi Kecamatan Prambanan dan sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Sebagai kawasan area non irigasi dan cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan serta banyak peninggalan situs candi. Investasi yang cocok adalah pemasaran dan diversifikasi produk perkebunan, pengembangan fasilitas wisata serta sarana *event* wisata untuk sejarah kepurbakalaan.

3. Kawasan Tengah

Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang meliputi Kecamatan Melati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan baru dan jasa. Investasi yang tepat untuk kawasan ini adalah pengembangan perdagangan baru untuk skala kecil hingga besar, wisata perkotaan, dan pengembangan bisnis jasa pendidikan.

4. Kawasan Barat

Kawasan ini meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan. Kawasan ini merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku sehingga sangat cocok untuk budidaya pertanian dan perikanan darat.

Kawasan-kawasan di Kabupaten Sleman tersebut memiliki sumberdaya alam yang kaya dan beragam, baik sumberdaya yang dapat diperbaharui maupun sumberdaya yang tidak dapat diperbaharui.

Selain itu, kawasan-kawasan tersebut juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi, seperti transportasi, industri, pasar, pemukiman dan pariwisata.

Pengembangan kawasan-kawasan sesuai dengan karakteristik wilayah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pendapatan perkapita antar kawasan. Deskripsi pertumbuhan PDRB, Indeks ketimpangan dan pendapatan perkapita pada 4 kawasan tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Pertumbuhan dan Indeks Williamson Antar Kawasan Kabupaten Sleman, 2011 - 2017

No	Kawasan	Indeks Williamson	Rerata Laju PDRB	Rerata PDRB Per Kapita
1	Utara	0.0755	4.06	17523.71
2	Tengah	0.1089	4.68	25867.85
3	Timur	0.0389	4.30	20860.69
4	Barat	0.0188	3.83	25193.24

Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Berdasarkan tabel 4.3. angka ketimpangan yang tinggi terjadi di kawasan Tengah (kawasan Aglomerasi Perkotaan) Di wilayah ini menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan, dan jasa. Masih tingginya perbedaan kawasan perkotaan dan pedesaan pada kawasan tersebut diduga menjadi penyebab tingginya ketimpangan.

4.2. Klasifikasi Kecamatan Berdasarkan Pertumbuhan Ekonomi

Pendekatan yang dilakukan dalam analisis tipologi Klassen adalah pendekatan daerah seperti yang diutarakan oleh Sjafrizal (1997: 27-38). Pendekatan ini mempunyai konsep yang serupa dengan pendekatan sektoral dan data yang digunakan juga berupa data PDRB dan pertumbuhan per kapita. Yang membedakan adalah empat daerah kuadran dibagi menurut klasifikasi daerah sebagai berikut:

1. Daerah yang maju dan cepat maju (Kuadran I). Kuadran ini merupakan kuadran daerah dengan laju pertumbuhan PDRB (g)

yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan daerah yang menjadi acuan (g) dan memiliki pertumbuhan PDRB per kapita (gk_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan (gk). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $gk_i > gk$.2.

2. Daerah maju tapi tertekan (Kuadran II). Daerah yang berada pada kuadran ini memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (g), tetapi memiliki pertumbuhan PDRB per kapita (gk_i) yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan (gk). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i < g$ dan $gk_i > gk$.3.
3. Daerah yang masih dapat berkembang dengan pesat (Kuadran III). Kuadran ini merupakan kuadran untuk daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih tinggi dari pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (g), tetapi pertumbuhan PDRB per kapita daerah tersebut (gk_i) lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan (gk). Klasifikasi ini biasa dilambangkan dengan $g_i > g$ dan $gk_i < gk$.4.
4. Daerah relatif tertinggal (Kuadran IV). Kuadran ini ditempati oleh daerah yang memiliki nilai pertumbuhan PDRB (g_i) yang lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi acuan (g) dan sekaligus pertumbuhan PDRB per kapita (gk_i) yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan PDRB per kapita daerah yang menjadi acuan (gk)

Selanjutnya, berdasarkan analisis Tipologi Klassen Kabupaten Sleman diperoleh hasil seperti yang ditunjukkan oleh tabel 4.4 sebagai berikut.

**Tabel 4.4. Tipologi Klassen Kabupaten Sleman
Periode Tahun 2011-2017**

Kuadran I	Kuadran II
Daerah maju dan cepat maju	Daerah Maju Tetapi Tertekan

Depok	Prambanan
<p style="text-align: center;">Kuadran III</p> <p style="text-align: center;">Daerah Masih Dapat Berkembang Moyudan, Minggir, Sayegan, Godean, Gamping, Mlati, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Pakem</p>	<p style="text-align: center;">Kuadran IV</p> <p style="text-align: center;">Daerah Relatif Tertinggal Berbah, Tempel, Cangkringan, Turi</p>

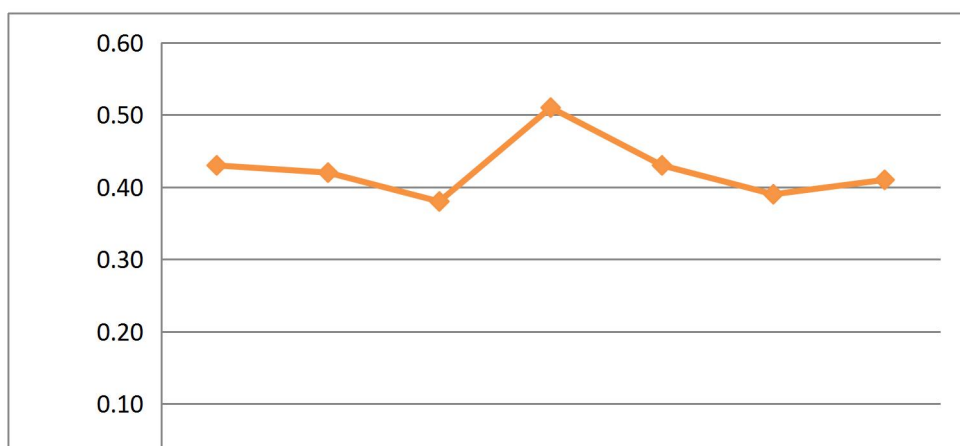
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa dengan analisis Tipologi Klassen, kecamatan di Kabupaten Sleman dibagi menjadi 4 klasifikasi. Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang maju dan cepat maju. Kecamatan Prambanan termasuk Kecamatan maju tetapi tertekan. Sedangkan Kecamatan Moyudan, Minggir, Sayegan, Godean, Gamping, Mlati, Kalasan, Ngemplak, Ngaglik, Sleman, Pakem adalah kecamatan yang masih dapat berkembang (potensial). Kemudian kecamatan yang relatif tertinggal yaitu Kecamatan Berbah, Tempel, dan Cangkringan.

4.3. Ketimpangan Antar Wilayah

4.3.1. Ketimpangan Antar Wilayah Kabupaten Sleman

Sebagai kabupaten dengan PDRB terbesar di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Sleman juga dihadapkan pada masalah ketimpangan. Hipotesis yang sering muncul adalah salah satu penyebab dari timbulnya ketimpangan tersebut dikarenakan laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Selanjutnya, ketimpangan di Kabupaten Sleman selama periode 2011-2017 diperlihatkan dalam gambar 4.6.



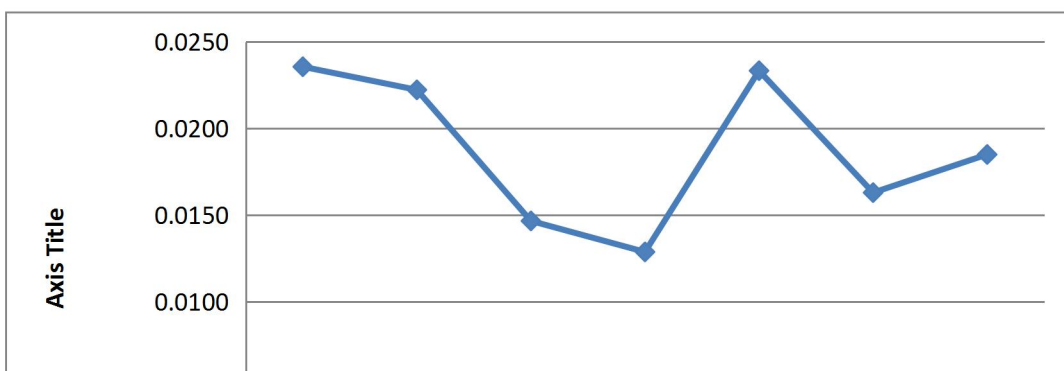
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.6. Indeks Williamson Kabupaten Sleman Tahun 2011-2017

Ketimpangan di Kabupaten Sleman dari tahun 2011-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson, ketimpangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 sebesar 0,43 terus berfluktuasi hingga menjadi 0,41 pada tahun 2017, bahkan berdasarkan prediksi besarnya ketimpangan di Kabupaten Sleman tiap tahunnya (secara tren) akan mengalami kenaikan sebesar 0,005 sehingga diperkirakan pada tahun 2019 ketimpangan di Kabupaten Sleman akan mencapai angka 0,5952.

4.3.2. Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Barat

Kawasan Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan dan Moyudan. Besarnya angka ketimpangan di Kawasan Barat Kabupaten Sleman pada tahun 2011 adalah 0,0236 dan pada tahun 2017 sebesar 0,0185. Angka ketimpangan di kawasan ini cukup kecil namun mengalami perubahan mendasar secara merata di setiap tahunnya. Hal tersebut dikarenakan kawasan ini merupakan daerah pertanian yang memiliki kecenderungan pendapatan regional dan perkapita yang rendah daripada daerah lainnya, sehingga potensi ketimpangan antar kawasan ini dapat terjadi.

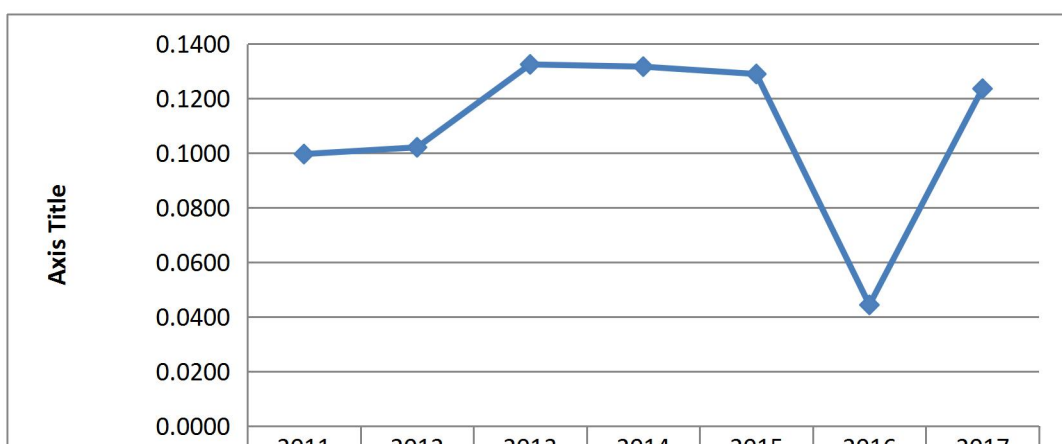


Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.7. Ketimpangan Kawasan Barat Kabupaten Sleman Tahun 2011-2017

4.3.3. Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Tengah (APY)

Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Sebagai pusat pendidikan, perdagangan baru dan jasa dan juga merupakan kawasan dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sleman angka ketimpangan di kawasan ini cukup besar dan cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 angka ketimpangan sebesar 0,0996 dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi sebesar 0,1235.

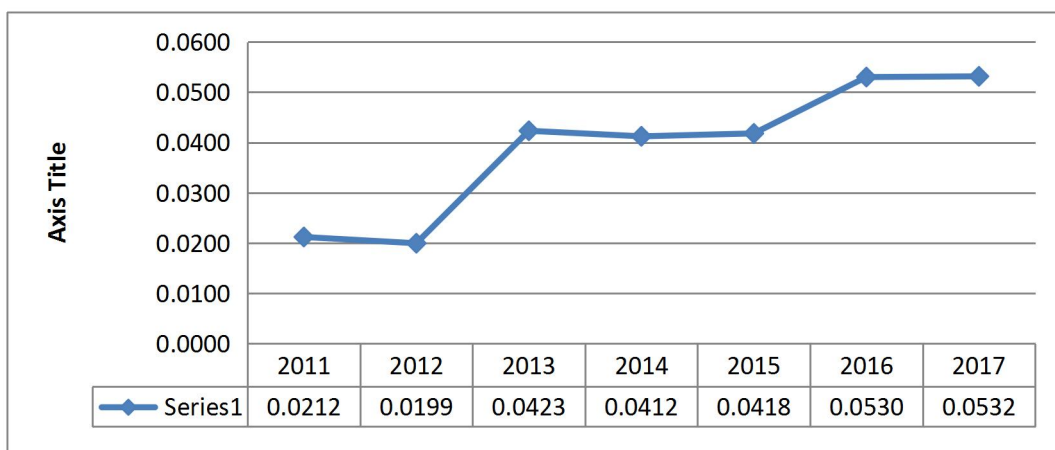


Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.8. Ketimpangan Kawasan Tengah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2017

4.3.4. Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Timur

Kawasan ini meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Sebagai kawasan area non irigasi dan cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan serta banyak peninggalan situs candi, angka ketimpangan di kawasan ini cenderung meningkat. Pada tahun 2011 angka ketimpangan di wilayah ini adalah sebesar 0,0212 dan menjadi 0,0532 pada tahun 2017.



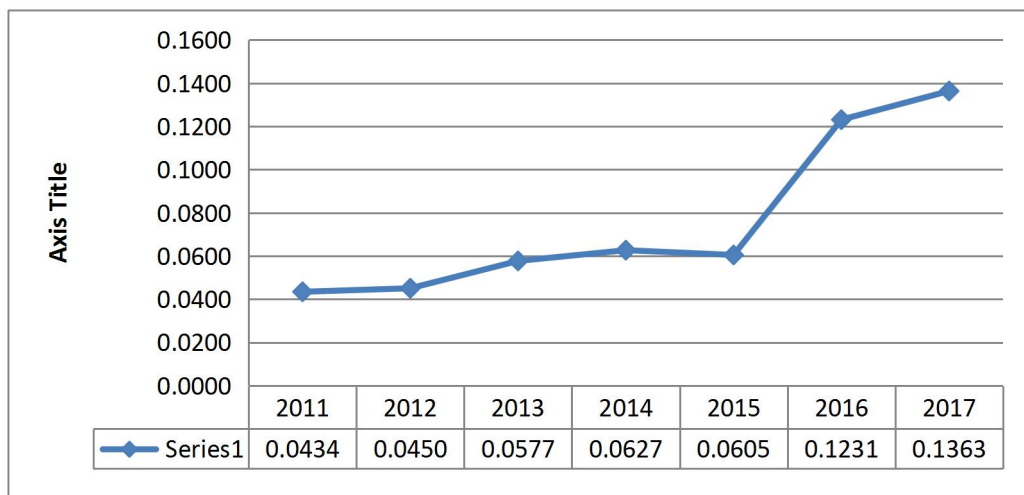
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.9. Ketimpangan Kawasan Timur Kabupaten Sleman Tahun 2011-2017

4.3.5. Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Utara

Ketimpangan di kawasan Lereng Merapi yang meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan ini cenderung meningkat meskipun tidak terlalu besar. Angka ketimpangan di kawasan ini,

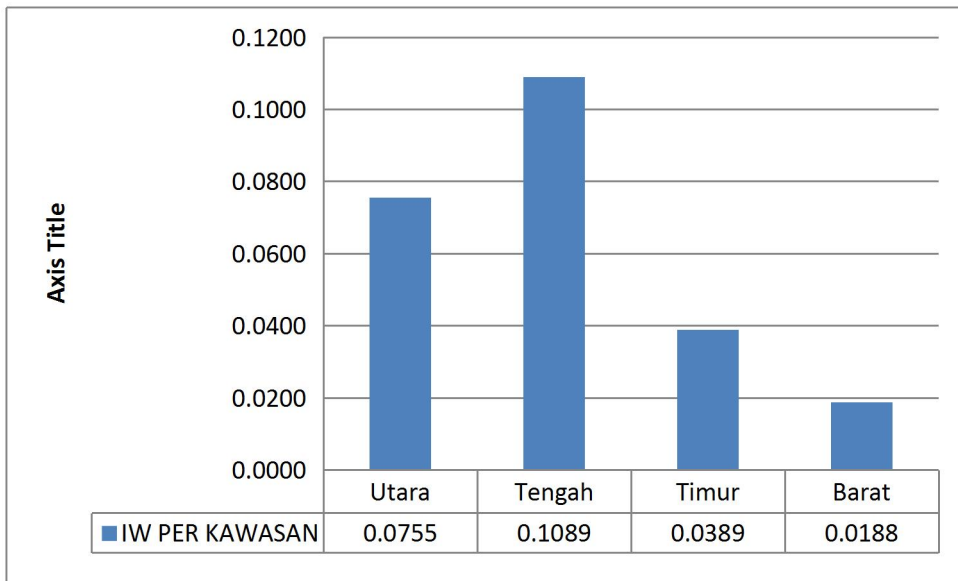
meskipun cenderung meningkat, tetapi juga yang paling kecil dibandingkan dengan kawasan yang lain. Pada tahun 2011 angka ketimpangan di kawasan ini sebesar 0,0434 dan menjadi 0,1363 pada tahun 2017. Relatif kecilnya angka ketimpangan di kawasan ini lebih disebabkan karena sebagian besar penduduknya memperoleh pendapatan dari bertani salak dengan luas lahan yang relatif hampir sama sehingga perbedaan pendapatan mereka tidak terlalu besar. Adanya kenaikan ketimpangan di wilayah ini mungkin lebih disebabkan oleh mulai tumbuhnya beberapa desa wisata dan tempat-tempat wisata di kawasan ini.



Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.10. Ketimpangan Kawasan Utara Kabupaten Sleman Tahun 2011-2017

Selanjutnya jika melihat rerata indeks Williamson dari masing-masing kawasan di Kabupaten Sleman, maka kawasan tengah (APY) memiliki nilai ketimpangan yang paling tinggi yaitu sebesar 0,10746. Sedangkan wilayah bagian barat memiliki nilai indeks Williamson yang paling rendah yaitu sebesar 0,01992.



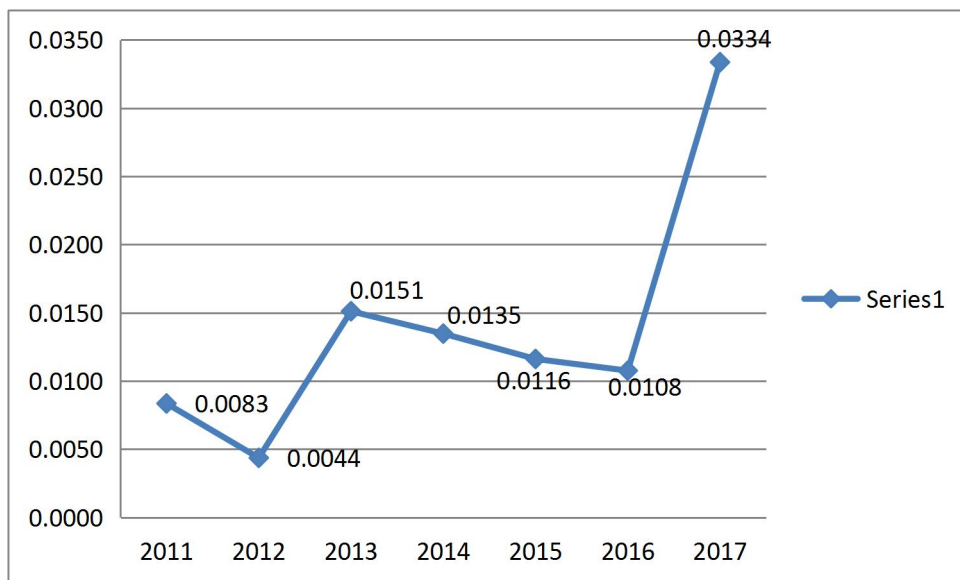
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.11. Indeks Williamson Per Kawasan Kabupaten Sleman Tahun 2011-2017

4.4. Ketimpangan Wilayah Per Kecamatan

4.4.1. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Moyudan

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Moyudan ditunjukkan oleh gambar 4.12.



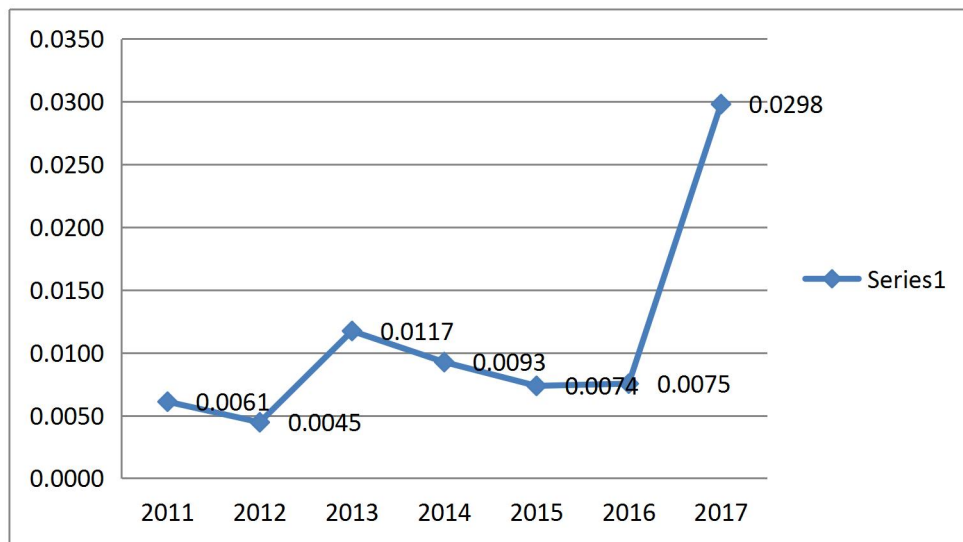
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.12. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Moyudan Tahun 2011-2017

Kecamatan Moyudan merupakan kecamatan yang berada di kawasan bagian barat Kabupaten Sleman. Jika melihat gambar 4.12 maka pada tahun 2011 ketimpangan di Kecamatan Moyudan adalah sebesar 0,0083, kemudian terus naik menjadi 0,0334 pada tahun 2017. Penduduk di daerah ini lebih banyak bekerja dan berusaha di sektor pertanian sehingga pendapatan penduduknya relatif tidak berbeda jauh.

4.4.2. Kecamatan Minggir

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Minggir ditunjukkan oleh gambar 4.13.



Sumber : Hasil Analisis, lampiran

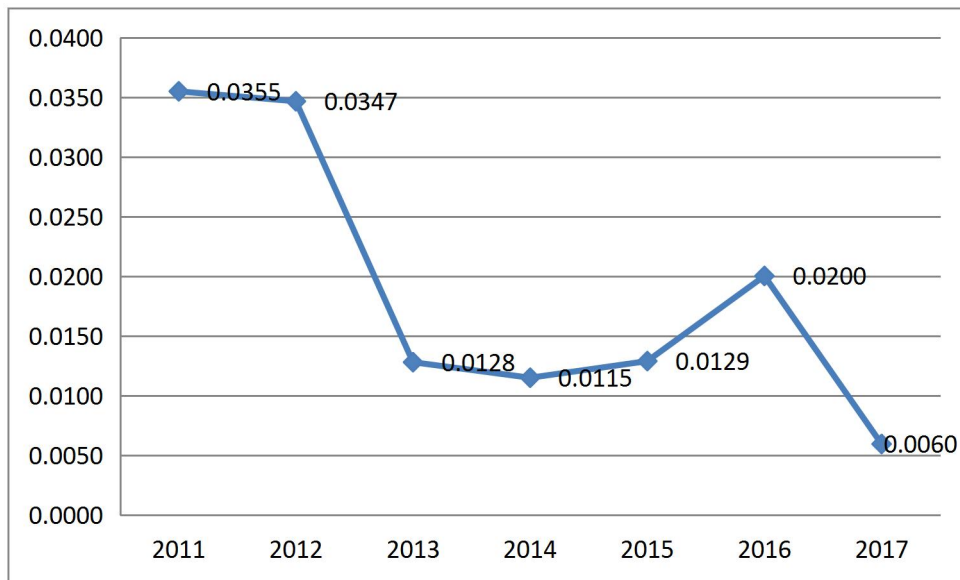
Gambar 4.13. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Minggir Tahun 2011-2017

Meskipun Kecamatan Minggir terletak di wilayah bagian barat Kabupaten Sleman yang secara rerata memiliki tingkat ketimpangan yang rendah, namun ketimpangan di Kecamatan Minggir cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat diartikan bahwa terdapat beberapa konsentrasi ekonomi yang tidak merata di Kecamatan Minggir sehingga terjadi kecenderungan peningkatan nilai ketimpangan secara tren di setiap tahunnya. Pada tahun 2011 tercatat ketimpangan di

Kecamatan Minggir adalah sebesar 0,0061, dan menjadi 0,0298 pada tahun 2017.

4.4.3. Kecamatan Sayegan

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Sayegan ditunjukkan oleh gambar 4.14.



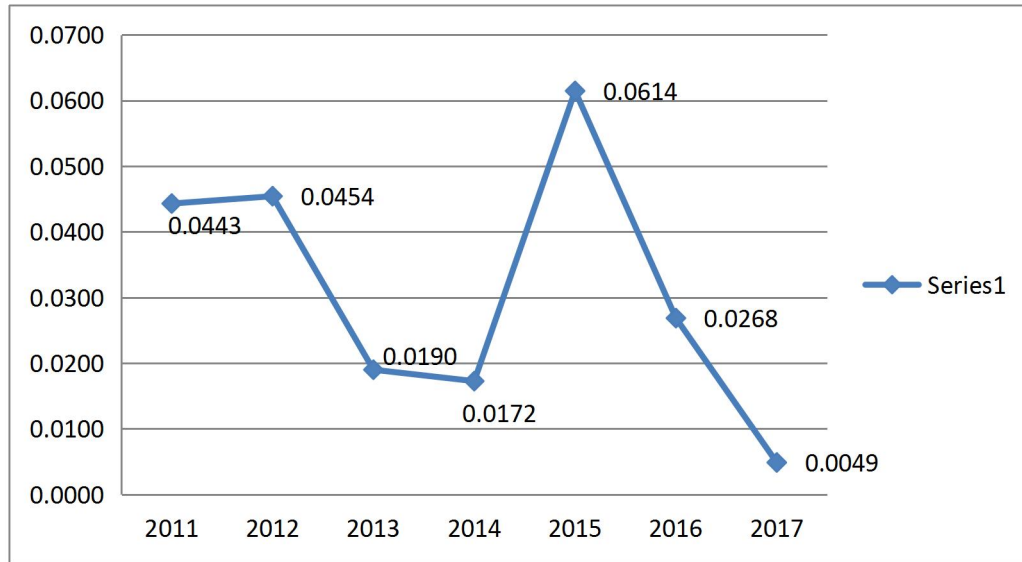
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.14. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Sayegan Tahun 2011-2017

Sebagai kawasan yang berada di bagian barat Kabupaten Sleman, ketimpangan di Kecamatan Sayegan memiliki trend penurunan di setiap tahunnya. Berdasarkan gambar 4.14 ketimpangan di Kecamatan Sayegan pada tahun 2011 adalah sebesar 0,0355 dan menjadi 0,0060 pada tahun 2017. Tren penurunan ketimpangan ini karena dimungkinkan tingkat konsentrasi ekonomi di Kecamatan Sayegan yang cenderung lebih merata jika dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya di kawasan barat. Hal tersebut dapat dilihat bahwa secara rerata dari tahun 2011-2017 ketimpangan di Kecamatan Sayegan adalah yang terendah.

4.4.4. Kecamatan Godean

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Godean ditunjukkan oleh gambar 4.15.



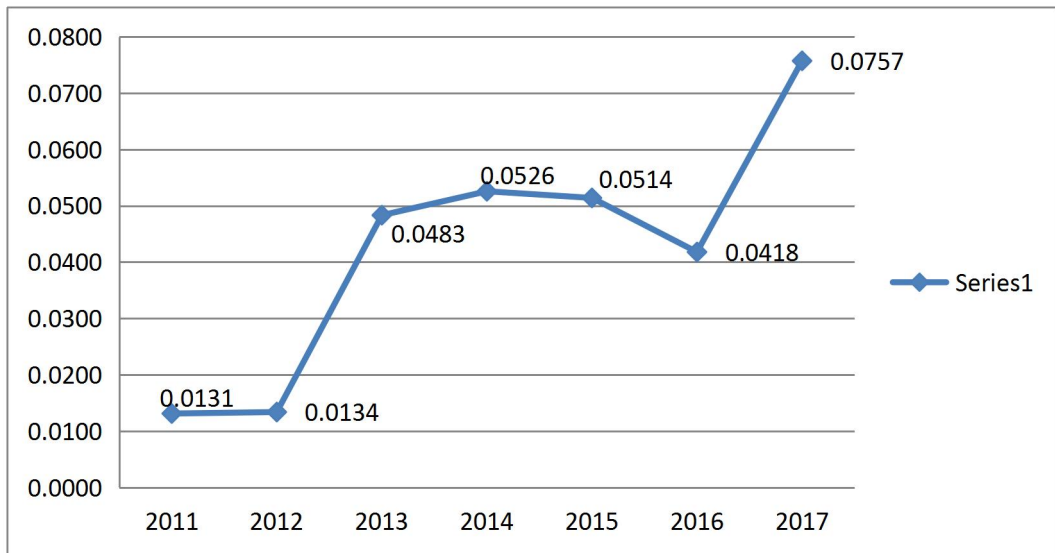
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.15. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Godean Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.15 dapat dilihat bahwa terdapat kecenderungan peningkatan ketimpangan di Kecamatan Godean. Pada tahun 2011 ketimpangan di Kecamatan Godean adalah sebesar 0,0443 dan ketimpangan tertinggi berada di tahun 2015 yaitu sebesar 0,0614. Jika dibandingkan dengan empat kecamatan lainnya di kawasan barat, Kecamatan Godean memiliki ketimpangan tertinggi secara rerata yaitu sebesar 0,0336. Salah satu penyebab tingginya ketimpangan di Kecamatan Godean lebih dimungkinkan karena ada beberapa wilayah yang memiliki tingkat konsentrasi tinggi dan kurang merata dalam persebarannya sehingga secara teoritis dapat meningkatkan tingkat ketimpangan.

4.4.5. Kecamatan Gamping

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Gamping ditunjukkan oleh gambar 4.16.



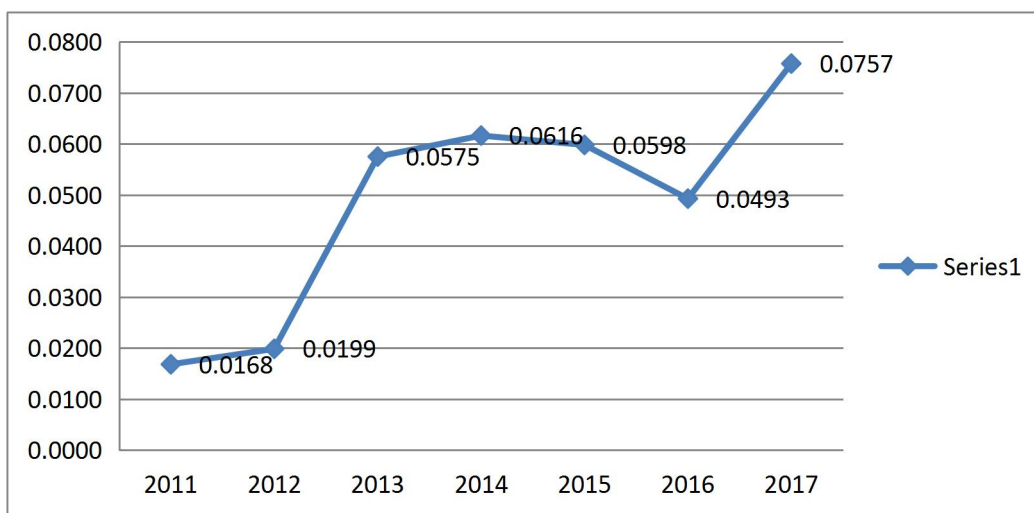
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.16. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Gamping Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.16 dapat dilihat bahwa secara tren tingkat ketimpangan di Kecamatan Gamping mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tercatat pada tahun 2011 ketimpangan di Kecamatan Gamping adalah sebesar 0,0131, kemudian menjadi 0,0757 pada tahun 2017. Sebagai sebuah kecamatan yang berada di kawasan tengah, secara rerata Kecamatan Gamping memiliki tingkat ketimpangan yaitu sebesar 0,0389.

4.4.6. Kecamatan Mlati

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Mlati ditunjukkan oleh gambar 4.17 berikut.



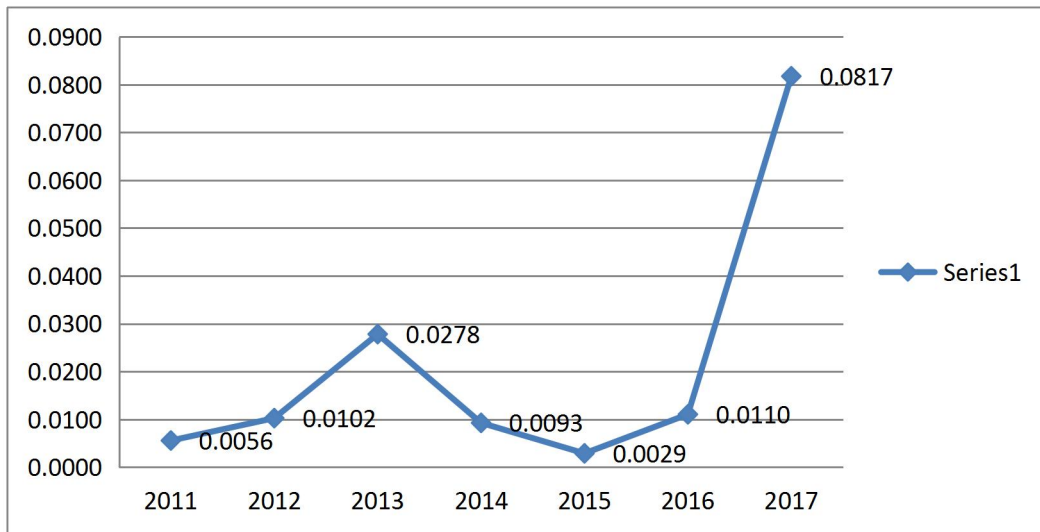
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.17. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Mlati Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.17 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan tingkat ketimpangan di Kecamatan Mlati secara signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2017. Pada tahun 2011 tercatat ketimpangan di Kecamatan Mlati adalah sebesar 0,0168 dan pada tahun 2017 sebesar 0,0757. Secara rerata tingkat ketimpangan di Kecamatan Mlati dari tahun 2011 hingga tahun 2017 adalah sebesar 0,0446. Jika dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah tengah, maka nilai ketimpangan Kecamatan Mlati secara rerata adalah cukup tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa tingkat konsentrasi ekonomi di Kecamatan Mlati masih terpusat pada satu jenis kegiatan ekonomi atau sumber-sumber penguasaan tertentu.

4.4.7. Kecamatan Depok

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Depok ditunjukkan oleh gambar 4.18 berikut.



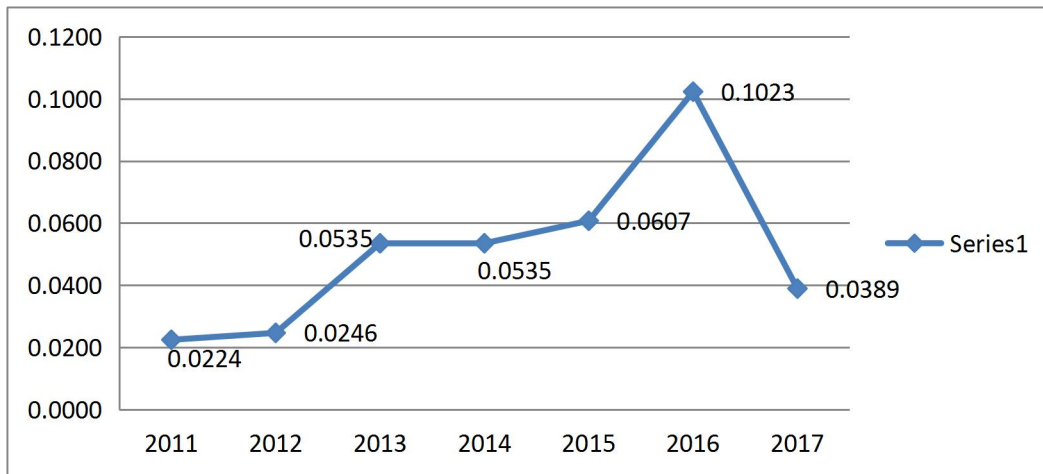
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.18. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Depok Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.18 dapat dilihat bahwa tren ketimpangan di Kecamatan Depok dari tahun 2011 hingga 2017 mengalami kenaikan. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 ketimpangan di Kecamatan Depok adalah sebesar 0,0056 dan pada tahun 2017 menjadi 0,0817. Peningkatan tingkat ketimpangan ini dapat dipahami bahwa Kecamatan Depok merupakan kecamatan yang berada di wilayah tengah Kabupaten Sleman. Kawasan tengah khususnya Kecamatan Depok adalah kawasan dengan tingkat konsentrasi ekonomi yang tinggi, sehingga adalah sangat dimungkinkan ketimpangan di Kecamatan Depok meningkat.

4.4.8. Kecamatan Berbah

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Berbah ditunjukkan oleh gambar 4.19 berikut.



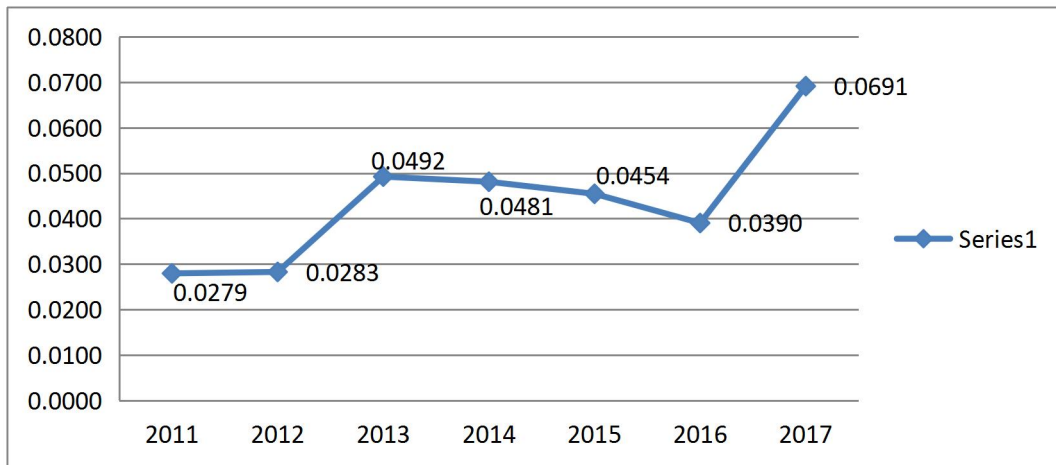
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.19. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Berbah Tahun 2011-2017

Kecamatan Berbah merupakan kecamatan yang berada di wilayah Timur Kabupaten Sleman. Berdasarkan grafik 4.19 dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan di Kecamatan Berbah mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2011 ke tahun 2017. Pada tahun 2011 ketimpangan di Kecamatan Berbah adalah sebesar 0,0224 dan menjadi 0,0389 pada tahun 2017. Secara rerata tingkat ketimpangan di Kecamatan Berbah adalah yang paling tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di kawasan timur Kabupaten Sleman (Kalasan dan Prambanan). Hal tersebut dapat diartikan bahwa tingkat konsentrasi ekonomi yang tinggi dan tidak tersebar merata menjadi salah satu sebab tingginya ketimpangan ekonomi di Kecamatan Berbah.

4.4.9. Kecamatan Prambanan

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Prambanan ditunjukkan oleh gambar 4.20 berikut.



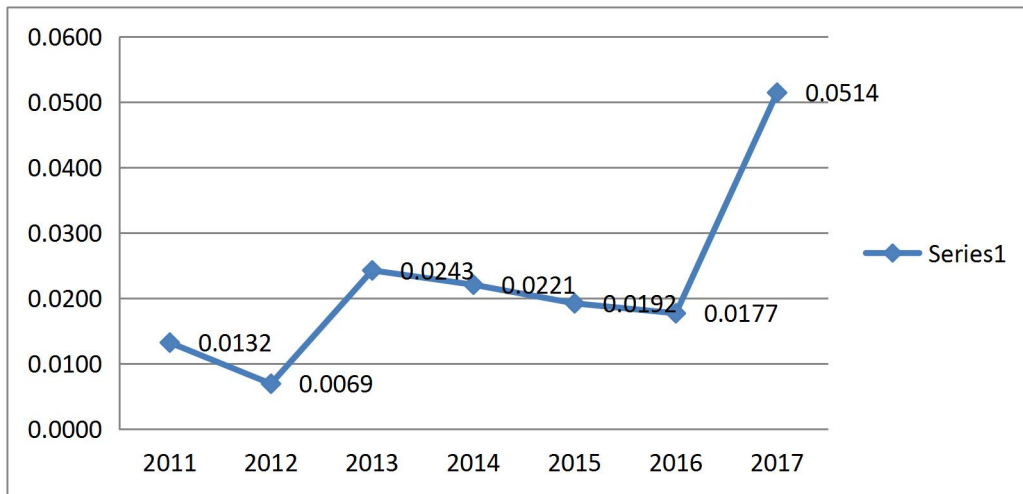
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.20. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Prambanan Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.20 dapat dilihat bahwa ketimpangan di Kecamatan Prambanan terus mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2017 meskipun sangat kecil. Tercatat pada tahun 2011 ketimpangan di Kecamatan Prambanan adalah sebesar 0,0279 dan pada tahun 2017 sebesar 0,0691. Secara rerata tingkat ketimpangan di Kecamatan Prambanan adalah sebesar 0,0418. Tingginya aktifitas ekonomi di Kecamatan Prambanan yaitu dengan destinasi wisata dan banyaknya kegiatan-kegiatan ekonomi terpusat adalah salah satu penyebab naiknya tingkat ketimpangan di Kecamatan Prambanan.

4.4.10 Kecamatan Kalasan

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Kalasan ditunjukkan oleh gambar 4.21 berikut.



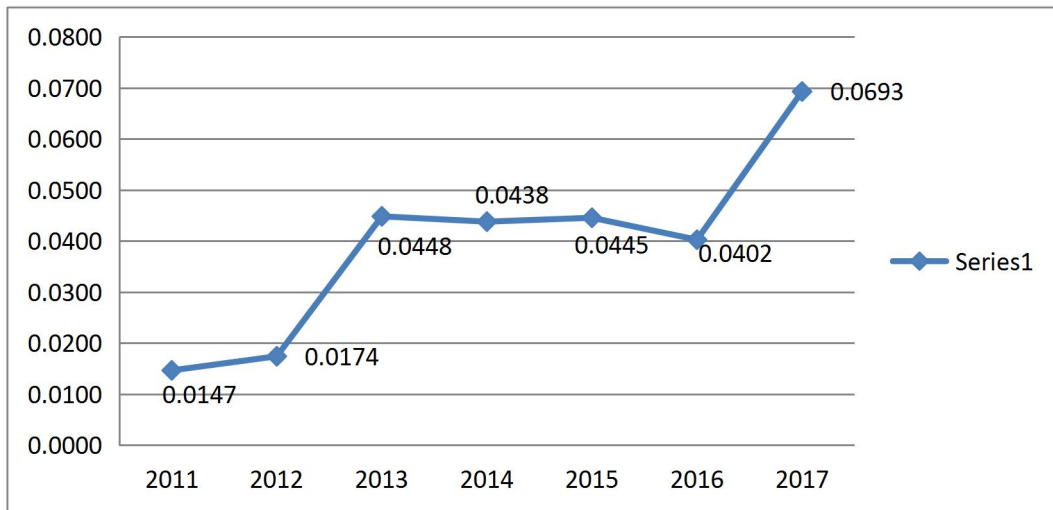
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.21. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Kalasan Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.21 dapat dilihat bahwa tingkat ketimpangan di Kecamatan Kalasan memiliki tren meningkat. Pada tahun 2011 ketimpangan di Kecamatan Kalasan adalah sebesar 0,0132, dan meningkat cukup signifikan di tahun 2017 menjadi 0,0514. Jika melihat kondisi geografis Kecamatan Kalasan yang berada di jalur utama jalan nasional maka dapat dimungkinkan konsentrasi ekonomi di kawasan ini meningkat. Di samping itu banyaknya cagar budaya yang memberikan daya tarik wisata menjadi salah satu penyebab trend ketimpangan di Kecamatan Kalasan meningkat.

4.4.10. Kecamatan Ngeplak

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Ngeplak ditunjukkan oleh gambar 4.22 berikut.



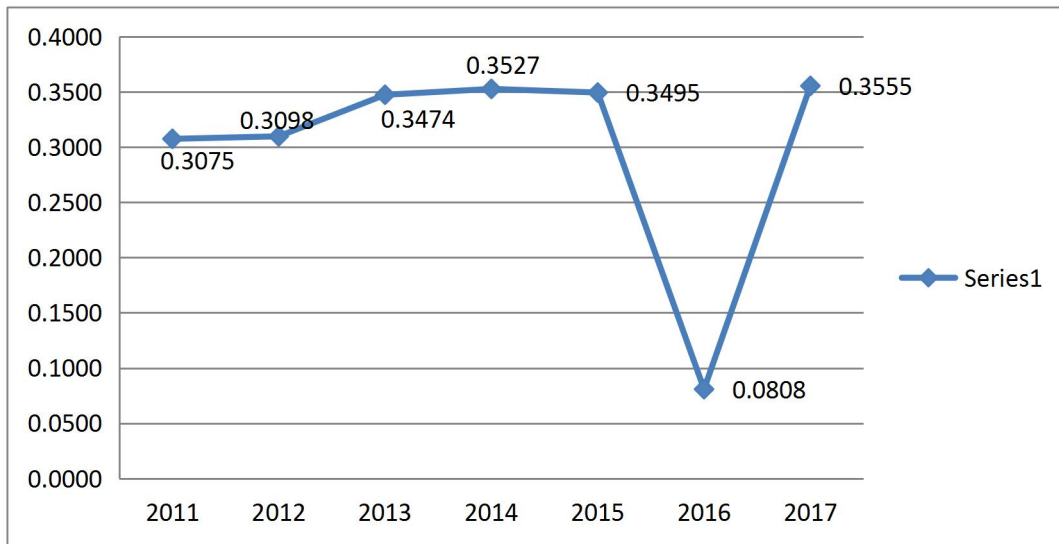
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.22. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Ngemplak Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.22 dapat dilihat bahwa ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Ngemplak memiliki trend naik. Pada tahun 2011 ketimpangan di Kecamatan Ngemplak adalah sebesar 0,0147 kemudian terus mengalami kenaikan hingga mencapai 0,0693 pada tahun 2017. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di kawasan tengah, secara rerata sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Ngemplak adalah yang terendah kedua yaitu sebesar 0,0357. Hal ini dapat dipahami bahwa meskipun berada di kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY), namun konsentrasi ekonomi di Kecamatan Ngemplak tidak terlalu terpusat pada suatu pengembangan perekonomian semata jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di kawasan tengah Kabupaten Sleman.

4.4.11. Kecamatan Ngaglik

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Ngaglik ditunjukkan oleh gambar 4.23 berikut.



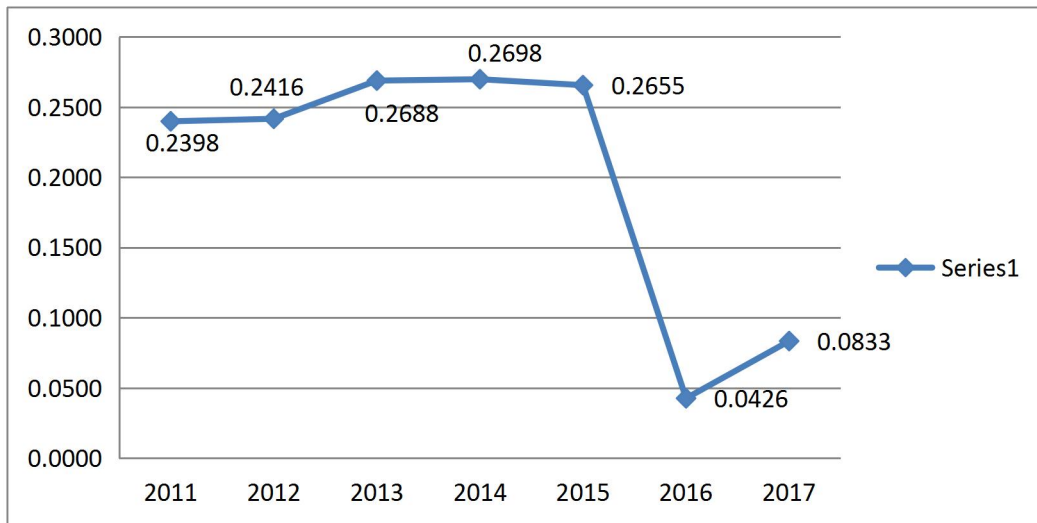
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.23. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Ngaglik Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.23 dapat dilihat bahwa ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Ngaglik cukup mengalami perubahan yang signifikan. Ketimpangan terendah terjadi di tahun 2016 yaitu sebesar 0,0808, dan ketimpangan tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 0,355. Hal ini dapat dipahami bahwa tingkat konsentrasi ekonomi yang merupakan salah satu penyebab timbulnya ketimpangan di Kecamatan Ngaglik lebih disebabkan karena alokasi dan tingkat pemerataan dari persebaran ekonomi yang kurang merata. Hal inilah yang pada akhirnya menyebabkan ketimpangan di Kecamatan Ngaglik terus mengalami perubahan yang cukup signifikan.

4.4.12. Kecamatan Sleman

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Sleman ditunjukkan oleh gambar 4.24 berikut.



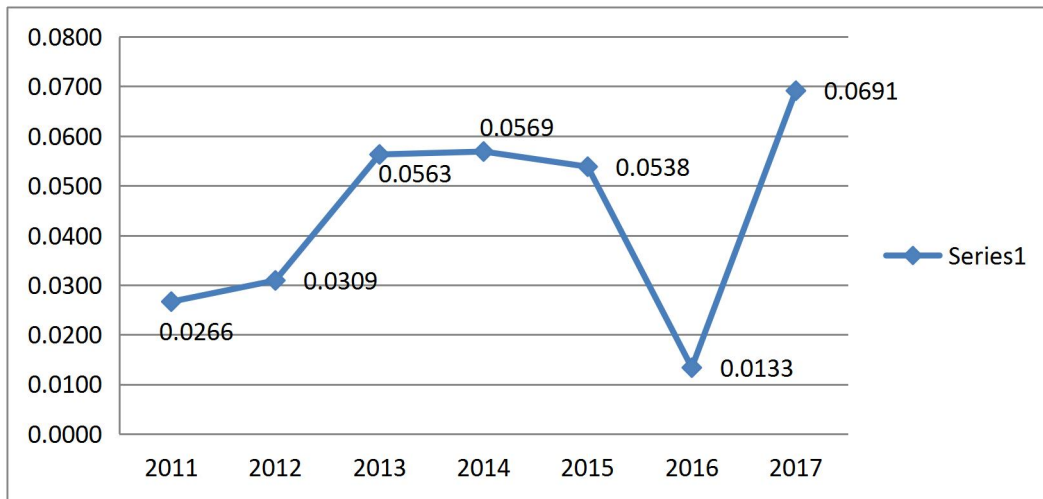
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.24. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Sleman Tahun 2011-2017

Sejak tahun 2011 hingga tahun 2015, tren ketimpangan di Kecamatan Sleman terus mengalami peningkatan, yaitu dari 0,2368 di tahun 2010 menjadi 0,2655 di tahun 2015. Angka ini adalah angka yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya dalam rentang waktu 2011-2015. Namun jika melihat gambar 4.24, ketimpangan yang sangat tinggi di tahun 2015 mampu turun secara signifikan hingga mencapai 0,0426 di tahun 2016 dan sedikit meningkat menjadi 0,0833 di tahun 2017. Tingkat ketimpangan yang begitu tinggi ini secara tidak langsung dipahami bahwa konsentrasi atas berbagai macam kegiatan-kegiatan ekonomi pada akhirnya memberikan dampak yang kurang baik. Oleh karenanya beberapa upaya pemerintah dalam mengatasi ketimpangan di pusat pemerintahan Kabupaten Sleman (Kecamatan Sleman) adalah sudah cukup baik, yang dibuktikan dengan angka ketimpangan yang turun cukup signifikan.

4.4.14. Kecamatan Tempel

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Tempel ditunjukkan oleh gambar 4.25 berikut.



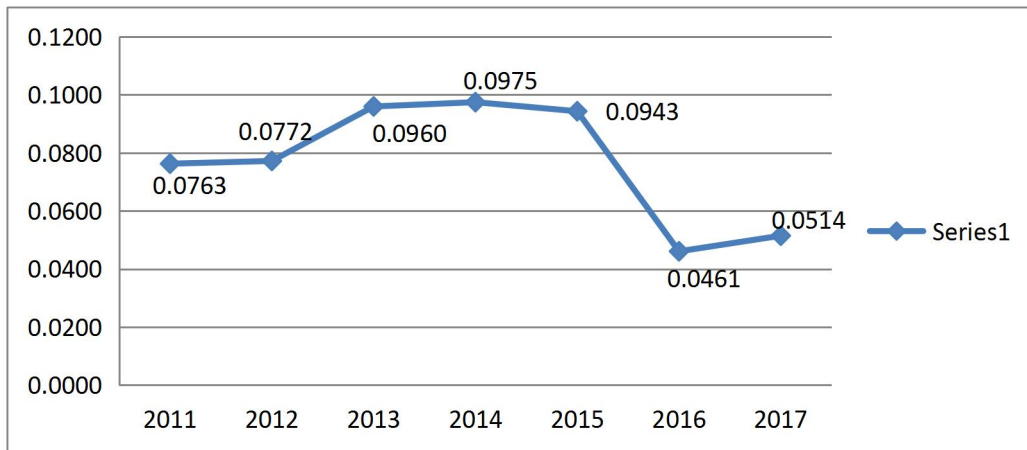
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.25. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Tempel Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.25 dapat dilihat bahwa tren ketimpangan di Kecamatan Tempel sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 terus mengalami kenaikan meskipun jumlahnya tidak begitu besar. Tercatat ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Tempel pada tahun 2011 adalah sebesar 0,0266 terus naik hingga mencapai 0,0691 pada tahun 2017. Di samping itu, secara rerata sejak tahun 2011 hingga tahun 2017 jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di kawasan utara, angka ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Tempel adalah yang terendah, yaitu sebesar 0,0410. Hal ini adalah sangat logis melihat kawasan utara memiliki tingkat konsentrasi ekonomi yang tidak hanya pada salah satu sektor tertentu sehingga tingkat ketimpangan wilayah cukup rendah, termasuk Kecamatan Tempel.

4.4.15. Kecamatan Turi

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Turi ditunjukkan oleh gambar 4.26 berikut.



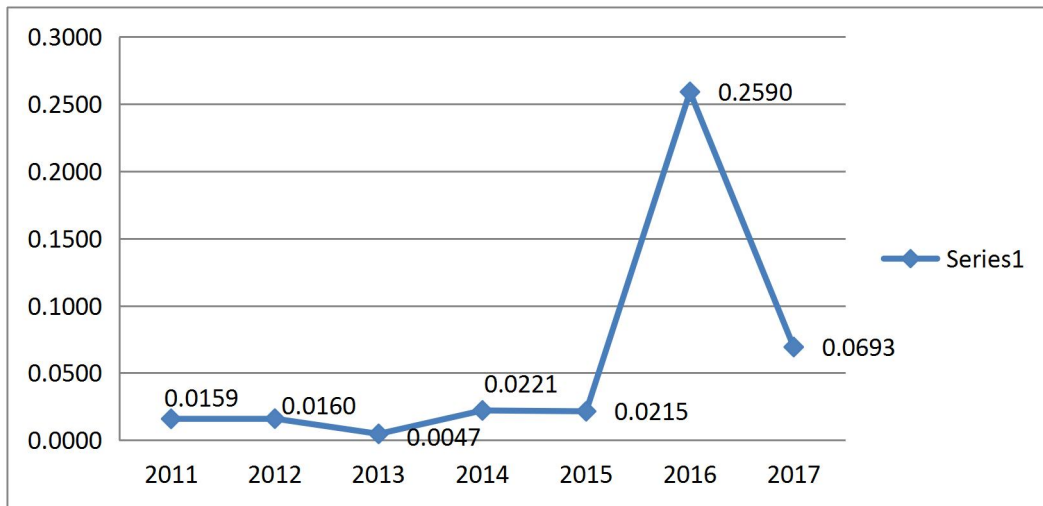
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.26. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Turi Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.26 dapat dilihat bahwa ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Turi terus mengalami perubahan setiap tahunnya. Tercatat bahwa pada tahun 2011 ketimpangan yang terjadi di Kecamatan Turi adalah sebesar 0,0763, dan menjadi 0,0514 di tahun 2017. Ketimpangan tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 0,0943. Jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, ketimpangan di Kecamatan Turi tergolong rendah. Cenderung rendah dan stabilnya angka ketimpangan di Kecamatan Turi mungkin lebih disebabkan karena sebagian besar penduduk Turi berprofesi sebagai petani salak dengan luas lahan yang relatif sama sehingga pendapatan mereka tidak terlalu signifikan perbedaannya

4.4.16. Kecamatan Pakem

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Pakem ditunjukkan oleh gambar 4.27 berikut.



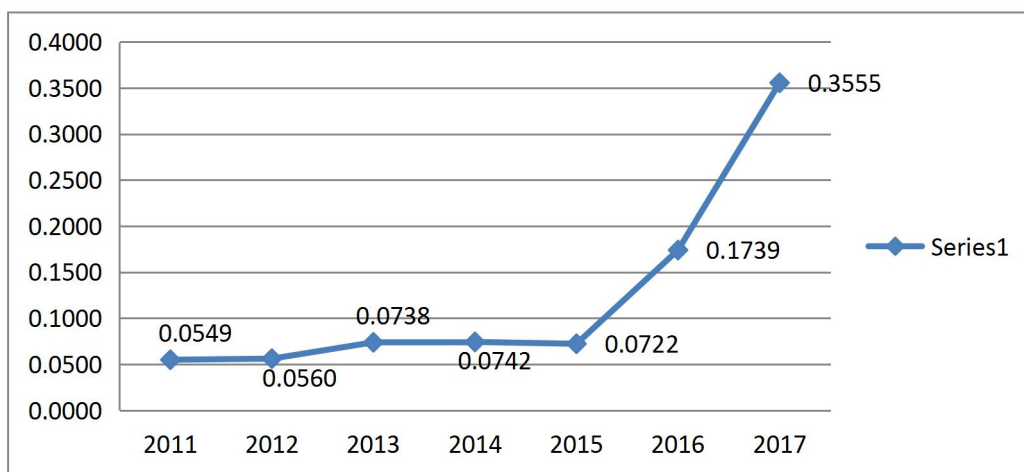
Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.27. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Pakem Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.27 dapat dilihat bahwa angka ketimpangan di Kecamatan Pakem adalah cukup tinggi jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sleman. Tercatat angka ketimpangan yang terjadi di tahun 2011 adalah sebesar 0,0159 dan menjadi 0,2590 di tahun 2016, namun dapat ditekan hingga mencapai 0,0693 di tahun 2017. Meskipun angka ketimpangan cukup tinggi, wilayah Kecamatan Pakem yang terdiri dari pertanian dan perkebunan yang luas menjadikan angka ketimpangan tersebut turun cukup drastis di tahun 2017. Tingginya angka ketimpangan di Kecamatan Pakem lebih disebabkan karena terdapat beberapa destinasi wisata di Kecamatan Pakem sehingga terdapat beberapa aktifitas ekonomi yang masih terpusat, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perubahan angka ketimpangan di setiap tahunnya.

4.4.17. Kecamatan Cangkringan

Ketimpangan wilayah di Kecamatan Cangkringan ditunjukkan oleh gambar 4.28 berikut.



Sumber : Hasil Analisis, lampiran

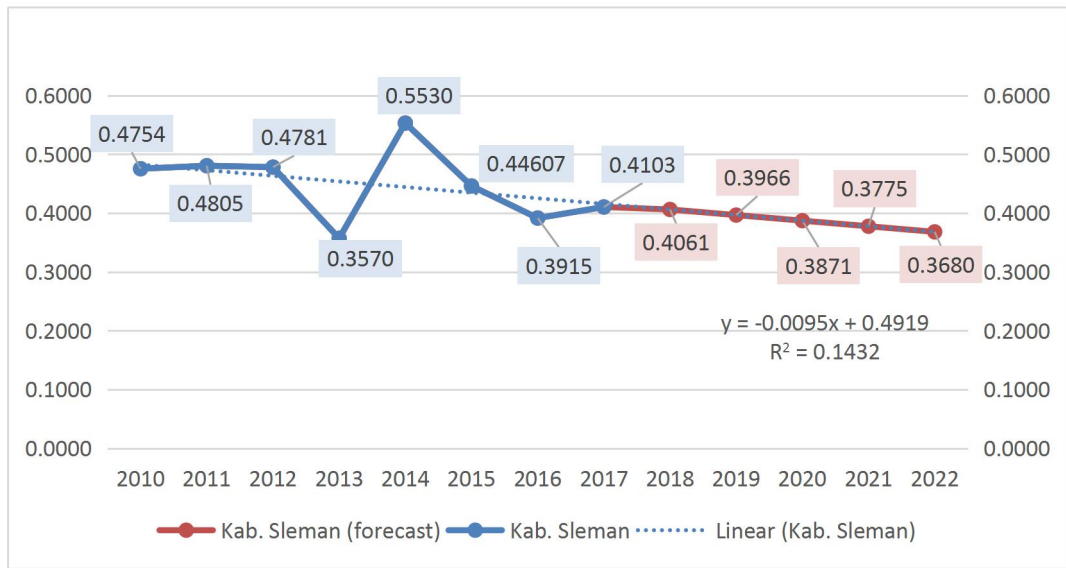
Gambar 4.28. Ketimpangan Wilayah Kecamatan Cangkringan Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.28 dapat dilihat bahwa angka ketimpangan di Kecamatan Cangkringan adalah cukup tinggi. Tercatat bahwa angka ketimpangan di Kecamatan Cangkringan tahun 2011 yaitu 0,0549 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 0,3555 di tahun 2017. Di samping itu secara rerata sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, angka ketimpangan di Kecamatan Cangkringan adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain di wilayah utara Kabupaten Sleman yaitu sebesar 0,1142

4.5. Trend Ketimpangan Antar Wilayah

4.5.1. Trend Ketimpangan Kabupaten Sleman

Trend ketimpangan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada gambar 4.29 sebagai berikut:



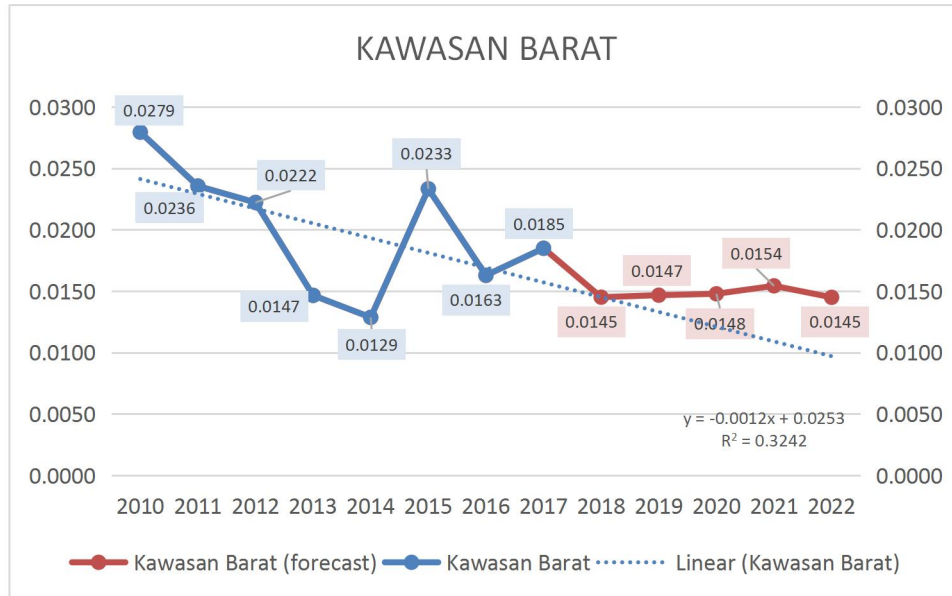
Gambar 4.29. Trend Ketimpangan Kabupaten Sleman

Ketimpangan di Kabupaten Sleman dari tahun 2011-2017 mengalami penurunan. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson, ketimpangan di Kabupaten Sleman pada tahun 2011 sebesar 0,4805 turun menjadi 0,4103 pada tahun 2017, berdasarkan prediksi besarnya ketimpangan di Kabupaten Sleman tiap tahunnya akan mengalami penurunan sebesar 0,0105 sehingga diperkirakan pada tahun 2022 ketimpangan di Kabupaten Sleman akan mencapai angka 0,3860.

4.5.2. Trend Ketimpangan Wilayah Barat

Kawasan Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan. Besarnya angka ketimpangan di Kawasan Barat Kabupaten Sleman pada tahun 2011 adalah 0,0236 dan diprediksikan akan mengalami penurunan sebesar 0,0007 pada tahun-tahun yang akan datang. Angka ketimpangan di kawasan ini cukup kecil bahkan cenderung mengalami penurunan karena Kawasan ini merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan sumber bahan baku sehingga sangat cocok untuk budidaya pertanian dan perikanan darat. Luas lahan pertanian dan perikanan darat yang

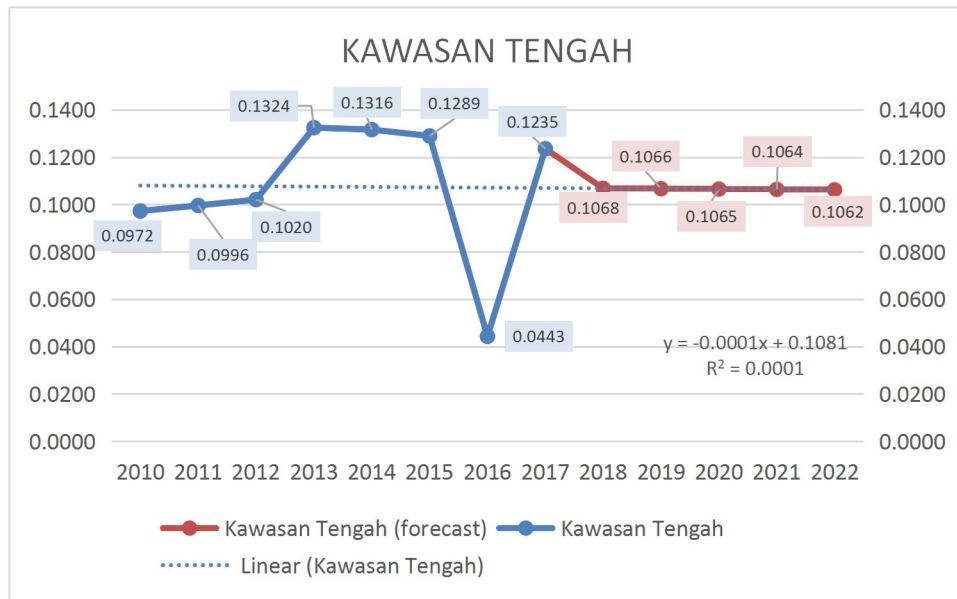
dimiliki penduduk relatif hampir sama sehingga pendapatan penduduk di kawasan ini tidak signifikan perbedaannya.



Gambar 4.30. Trend Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Barat

4.5.3. Trend Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian tengah (APY)

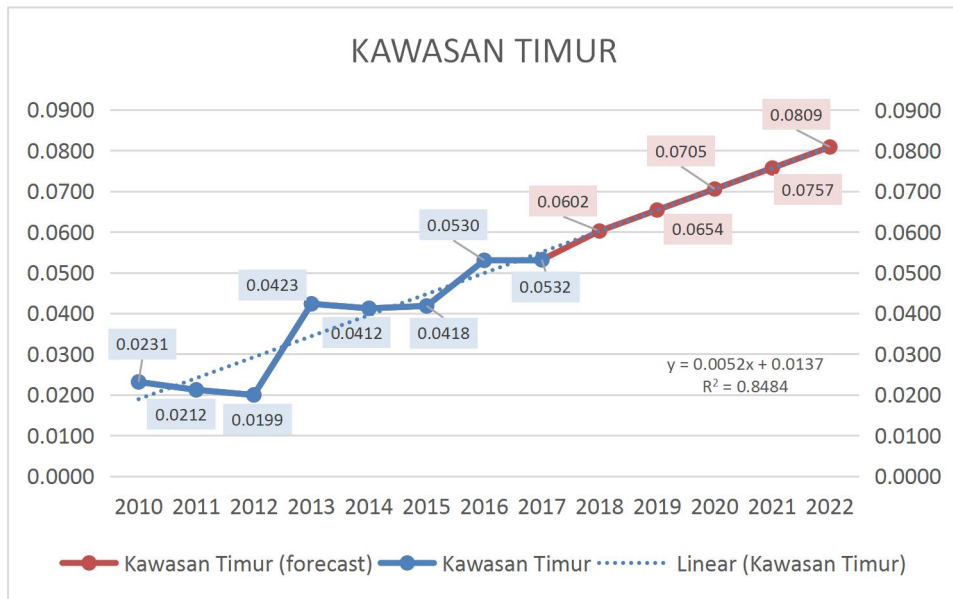
Kawasan Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) yang meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan Gamping. Sebagai pusat pendidikan, perdagangan baru dan jasa dan juga merupakan kawasan dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di Kabupaten Sleman angka ketimpangan di kawasan ini cukup besar dan cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 angka ketimpangan sebesar 0,0996 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 yaitu sebesar 0,1235, namun mengalami trend penurunan. Pada tahun berikutnya sebesar 0,0017. Dengan adanya trend penurunan tersebut diprediksikan pada tahun 2022 angka ketimpangan antar wilayah di Kawasan Tengah sebesar 0,0955.



Gambar 4.31. Trend Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Tengah

4.5.4. Trend Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Timur

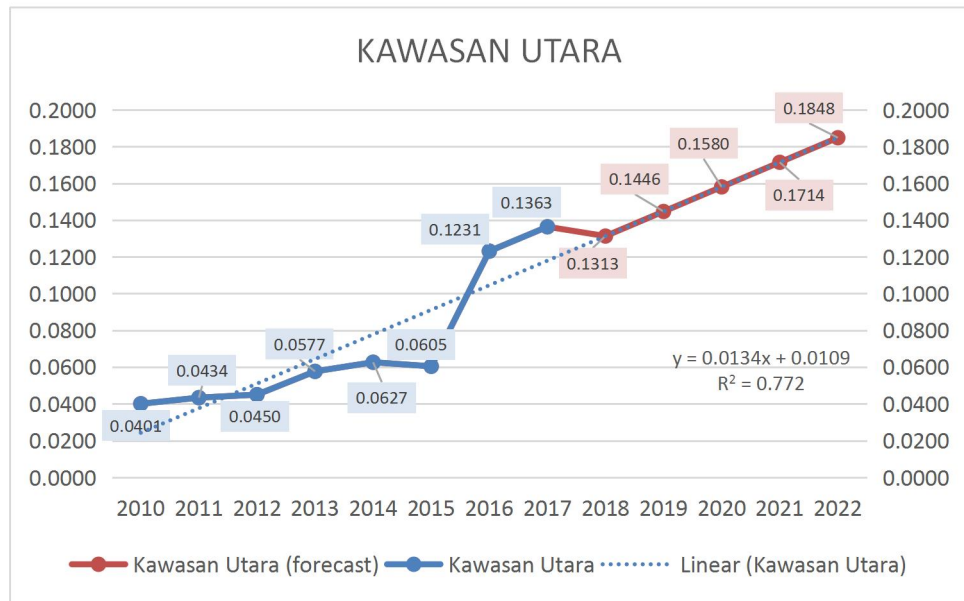
Kawasan ini meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Sebagai kawasan area non irigasi dan cocok untuk pengembangan tanaman perkebunan serta banyak peninggalan situs candi, angka ketimpangan di kawasan ini cenderung meningkat. Diprediksikan pada tahun 2022 angka ketimpangan di Kawasan ini sebesar 0,0851 dari 0,0212 pada tahun 2011.



Gambar 4.32. Trend Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Timur

4.5.5. Trend Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Utara

Trend ketimpangan di kawasan Lereng Merapi yang meliputi Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan ini cenderung meningkat (0,0156 tiap tahun). Angka ketimpangan di kawasan ini, meskipun cenderung meningkat, tetapi juga yang paling kecil dibandingkan dengan kawasan yang lain. Pada tahun 2011 angka ketimpangan di kawasan ini sebesar 0,0434 dan diprediksikan naik menjadi 0,2006 pada tahun 2022. Relatif kecilnya angka ketimpangan di kawasan ini lebih disebabkan karena sebagian besar penduduknya memperoleh pendapatan dari bertani salak dengan luas lahan yang relatif hampir sama sehingga perbedaan pendapatan mereka tidak terlalu besar. Adanya trend ketimpangan yang meningkat di wilayah ini mungkin lebih disebabkan oleh mulai tumbuhnya beberapa desa wisata dan tempat-tempat wisata di kawasan ini.

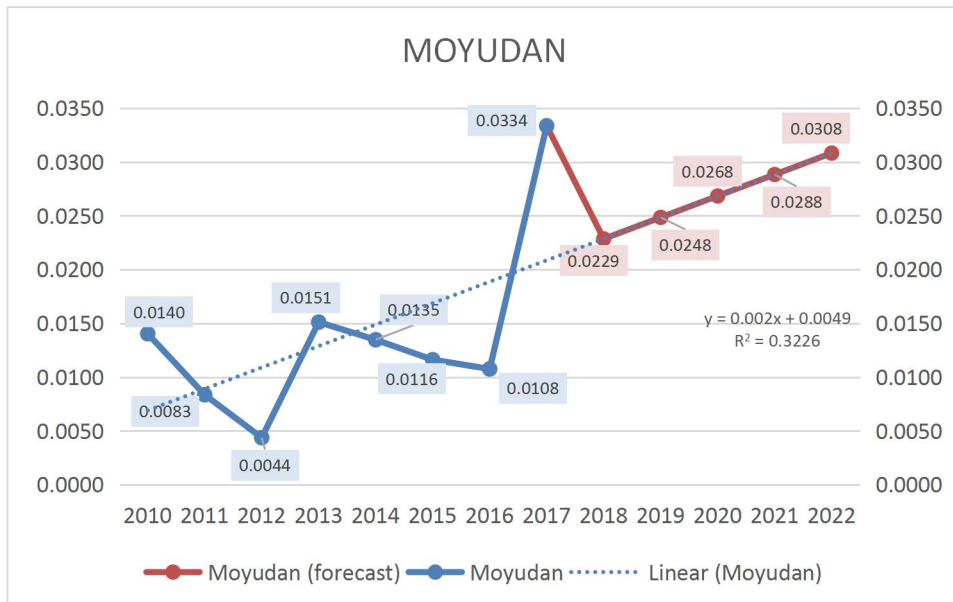


Gambar 4.33. Trend Ketimpangan Wilayah Sleman Bagian Utara

4.5.6. Trend Ketimpangan Wilayah Kecamatan

4.5.6.1. Trend Ketimpangan Kecamatan Moyudan

Trend ketimpangan Kecamatan Moyudan ditunjukkan oleh gambar 4.35 sebagai berikut:

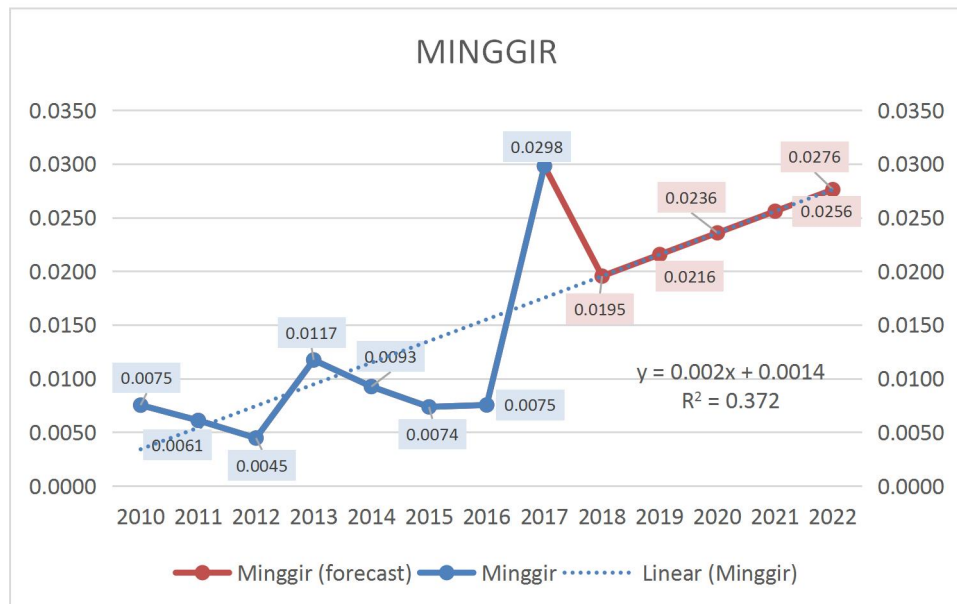


Gambar 4.34. Trend Ketimpangan Kecamatan Moyudan

Angka ketimpangan di Kecamatan Moyudan tahun 2011-2017 mengalami kenaikan, berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, besarnya ketimpangan tahun 2011 adalah 0,0083 naik menjadi 0,0334 pada tahun 2017. Diprediksikan besarnya ketimpangan di Kecamatan Moyudan akan mengalami kenaikan sebesar 0,003 setiap tahunnya. Penduduk di daerah ini lebih banyak bekerja dan berusaha di sektor pertanian sehingga pendapatan penduduknya relatif tidak berbeda jauh.

4.5.6.2. Trend Ketimpangan Kecamatan Minggir

Trend ketimpangan Kecamatan Minggir dapat dilihat pada gambar 4.35 sebagai berikut:

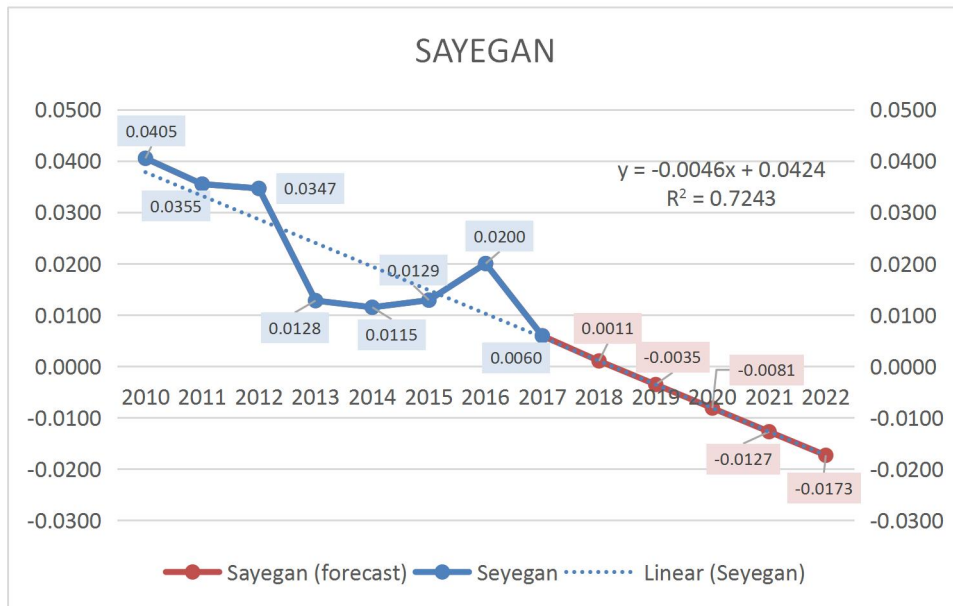


Gambar 4.35. Trend Ketimpangan Kecamatan Minggir

Angka ketimpangan di Kecamatan Minggir dari tahun 2011-2017 cukup kecil namun mengalami kenaikan, dimana besarnya ketimpangan pada tahun 2011 sebesar 0,0061 naik menjadi 0,0298 pada tahun 2017. Trend ketimpangan di Kecamatan Minggir mengalami kenaikan setiap tahunnya sebesar 0,0026.

4.5.6.3. Trend Ketimpangan Kecamatan Seyegan

Trend ketimpangan Kecamatan Seyegan dapat dilihat pada gambar 4.36 sebagai berikut:

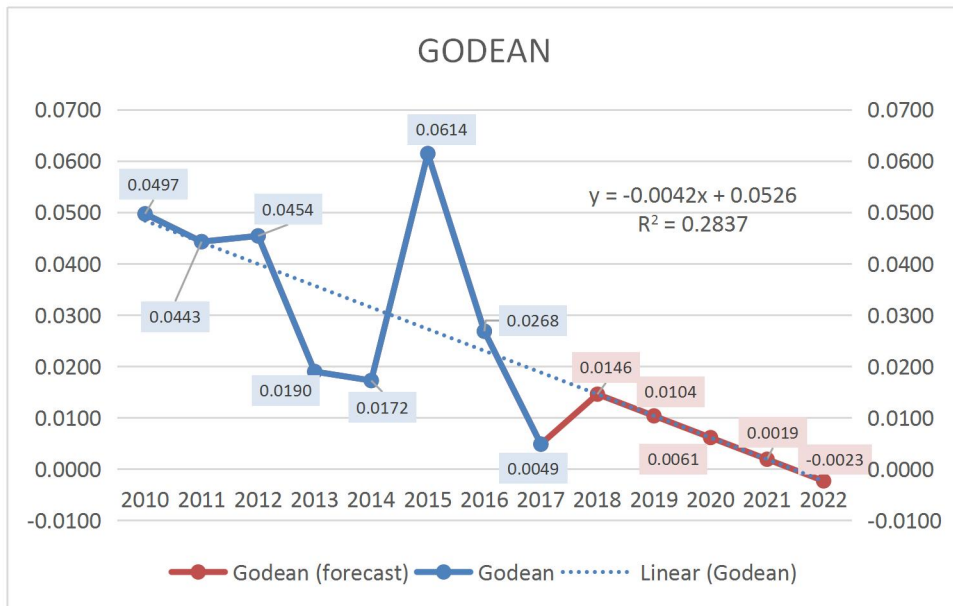


Gambar 4.36. Trend Ketimpangan Kecamatan Seyegan

Berbeda dengan Kecamatan Moyudan dan Minggir, angka ketimpangan di Kecamatan Seyegan tahun 2011-2017 cenderung turun. Tercatat pada tahun 2011 angka ketimpangan sebesar 0,0355 turun menjadi 0,0060 pada tahun 2017. Trend ketimpangan di Kecamatan Seyegan mengalami penurunan sebesar 0,0042 setiap tahunnya.

4.5.6.4. Trend Ketimpangan Kecamatan Godean

Trend ketimpangan Kecamatan Godean dapat dilihat pada gambar 4.37. sebagai berikut:

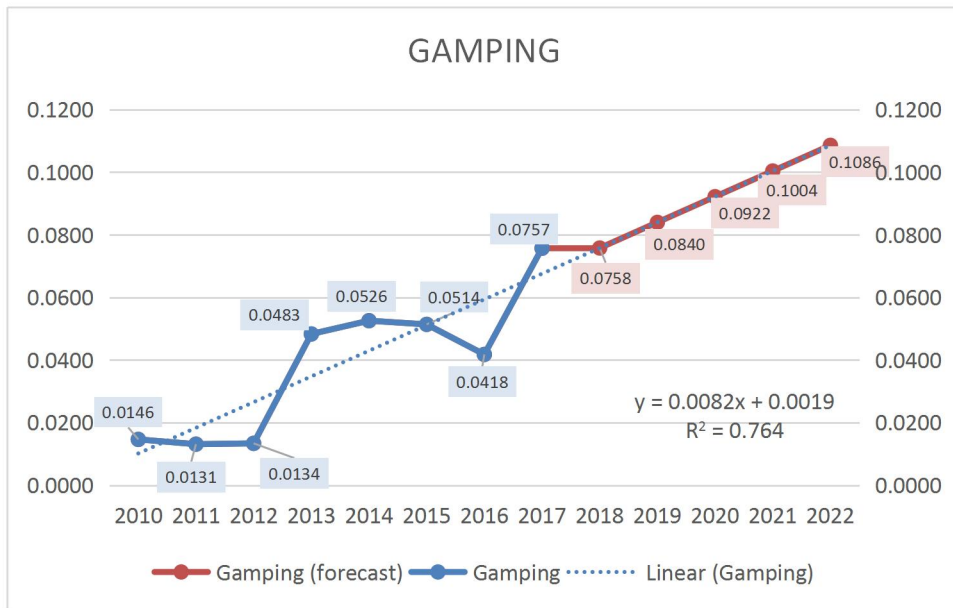


Gambar 4.37. Trend Ketimpangan Kecamatan Godean

Kecamatan Godean merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sleman yang mempunyai angka ketimpangan yang fluktuatif meskipun angka ketimpangannya tidak terlalu besar. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, angka ketimpangan pada tahun 2011 sebesar 0,0443 naik menjadi 0,0614 pada tahun 2015 dan mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi sebesar 0,0049. Trend ketimpangan di Kecamatan Godean akan mengalami penurunan sebesar 0,004 setiap tahunnya.

4.5.6.5. Trend Ketimpangan Kecamatan Gamping

Trend ketimpangan Kecamatan Gamping dapat dilihat pada gambar 4.38 sebagai berikut:

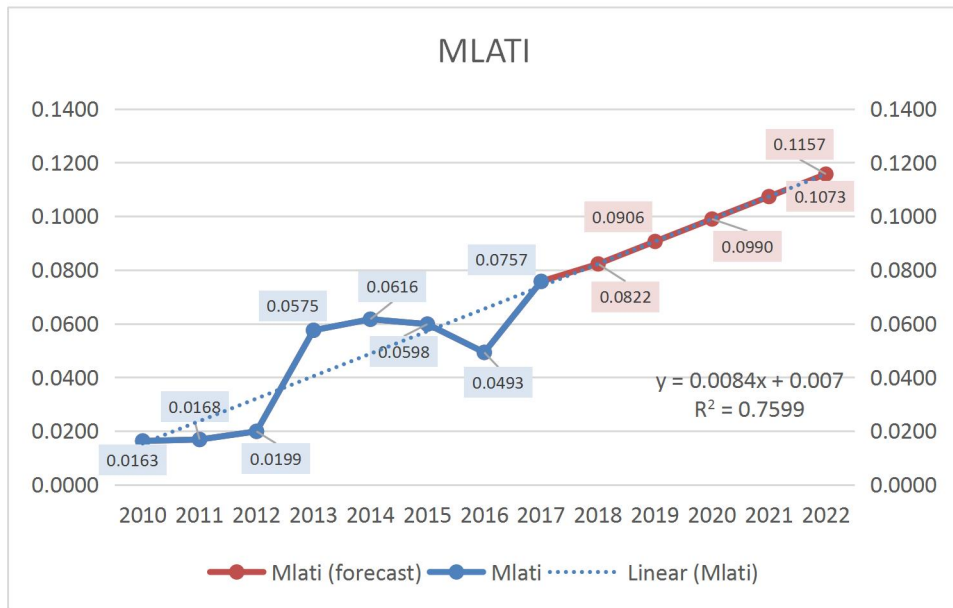


Gambar 4.38. Trend Ketimpangan Kecamatan Gamping

Angka ketimpangan di Kecamatan Gamping mengalami kenaikan dimana pada Tahun 2011 sebesar 0,0131 naik menjadi 0,0757 pada tahun 2017. Angka ketimpangan ini diprediksikan akan naik menjadi 0,1131 pada tahun 2022 dimana setiap tahunnya mengalami kenaikan sebesar 0,008.

4.5.6.6. Trend Ketimpangan Kecamatan Mlati

Trend ketimpangan Kecamatan Mlati dapat dilihat pada gambar 4.39 sebagai berikut:

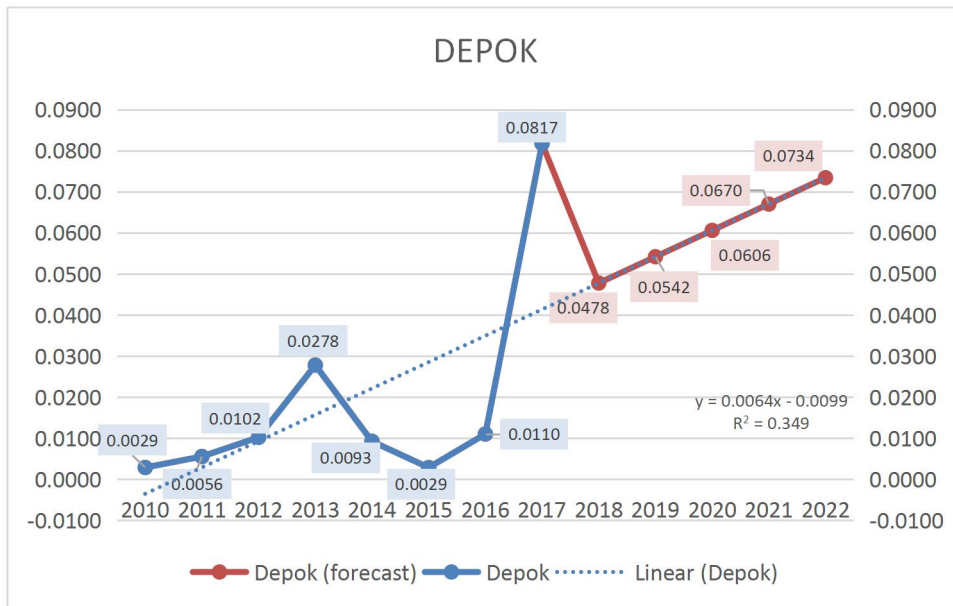


Gambar 4.39. Trend Ketimpangan Kecamatan Mlati

Angka ketimpangan di Kecamatan Mlati hampir sama dengan angka ketimpangan di Kecamatan Gamping. Pada tahun 2011 besarnya ketimpangan di Kecamatan Mlati sebesar 0,0168 naik menjadi 0,0757 pada tahun 2017. Angka ini diprediksikan terus mengalami kenaikan sebesar 0,0085 setiap tahunnya menjadi 0,1166 pada tahun 2022.

4.5.6.7. Trend Ketimpangan Kecamatan Depok

Trend ketimpangan Kecamatan Depok ditunjukkan oleh gambar 4.40 sebagai berikut:

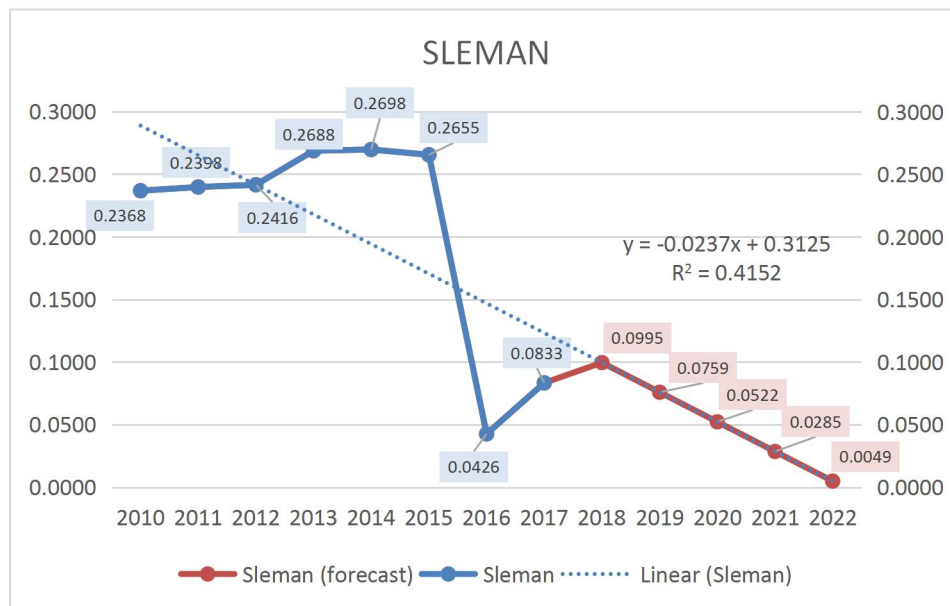


Gambar 4.40. Trend Ketimpangan Kecamatan Depok

Kecamatan Depok adalah salah satu kecamatan dengan angka ketimpangan yang cukup fluktuatif. Besarnya ketimpangan di Kecamatan Depok tahun 2011 adalah 0,0056 naik menjadi 0,0278 pada tahun 2013 kemudian naik lagi menjadi 0,0798 pada tahun 2017. Meskipun fluktuatif, angka ketimpangan di Kecamatan Depok diprediksikan mengalami kenaikan sebesar 0,0073 setiap tahunnya.

4.5.6.8. Trend Ketimpangan Kecamatan Sleman

Trend ketimpangan kecamatan Sleman ditunjukkan oleh gambar 4.41 sebagai berikut:



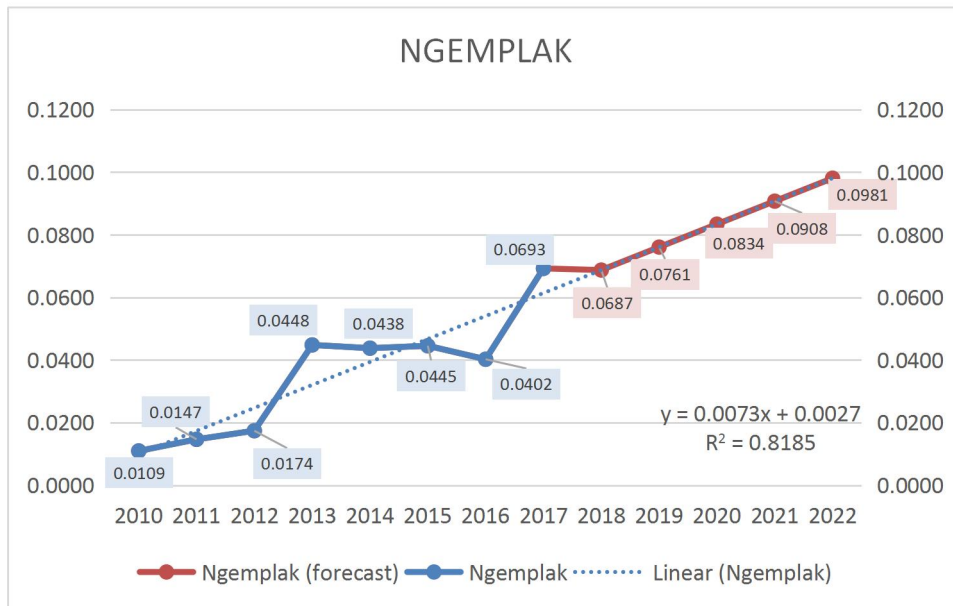
Gambar 4.41. Trend Ketimpangan Kecamatan Sleman

Kecamatan Sleman merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman dengan angka ketimpangan cukup besar (nomor 2 setelah Kecamatan Ngaglik). Sebagai pusat pemerintahan, dan juga pusat kegiatan ekonomi karena beberapa hotel dan pusat perbelanjaan ada di wilayah Kecamatan Sleman, angka ketimpangan di Kecamatan Sleman cukup besar namun mengalami kecenderungan turun. Banyaknya pegawai pemerintahan yang berasal dari luar Kecamatan Sleman akan tetapi tinggal di Kecamatan Sleman, sementara di sisi lain penduduk asli banyak yang hanya bekerja dan berusaha di sektor pertanian, membuat angka ketimpangan di wilayah ini cukup besar.

Pada tahun 2011 angka ketimpangan sebesar 0,2398 naik menjadi 0,2655 pada tahun 2015, namun mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 0,0426 Diprediksikan pada tahun 2022 angka ketimpangan di Kecamatan Sleman sebesar 0,0471 dengan angka penurunan pertahun sebesar 0,0311.

4.5.6.9. Trend Ketimpangan Kecamatan Ngemplak

Trend ketimpangan Kecamatan Ngemplak ditunjukkan oleh gambar 4.42 sebagai berikut:

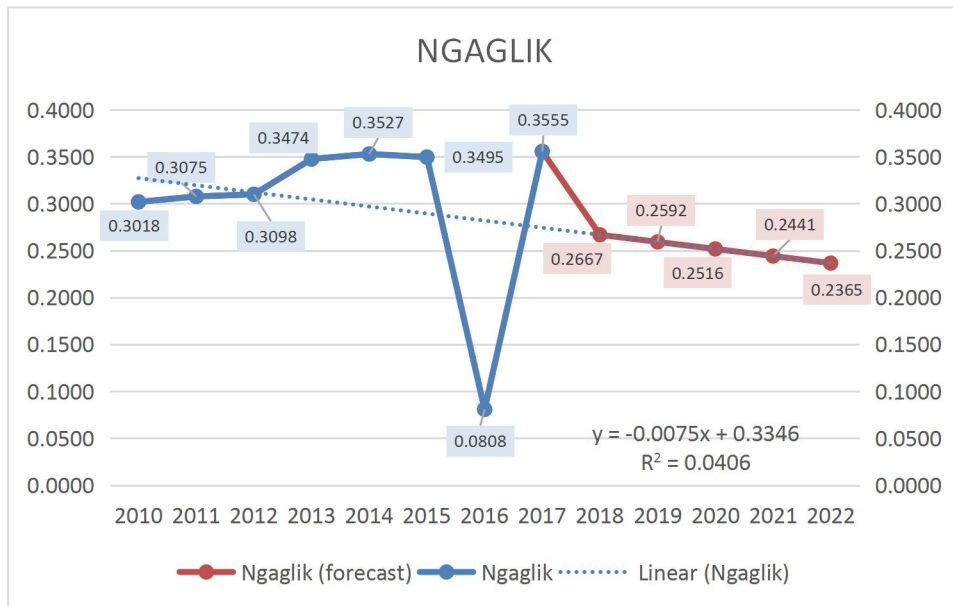


Gambar 4.42. Trend Ketimpangan Kecamatan Ngemplak

Meskipun angka ketimpangannya tidak terlalu besar namun angka ketimpangan di Kecamatan Ngemplak terus mengalami peningkatan dari 0,0147 pada tahun 2011 menjadi 0,0693 pada tahun 2017. Jika diprediksi tiap tahunnya angka ketimpangan di Kecamatan Ngemplak naik 0,0075 maka pada tahun 2022 angka ketimpangan akan naik cukup signifikan menjadi 0,0990.

4.5.6.10. Trend Ketimpangan Kecamatan Ngaglik

Trend ketimpangan Kecamatan Ngaglik ditunjukkan oleh gambar 4.43 sebagai berikut:

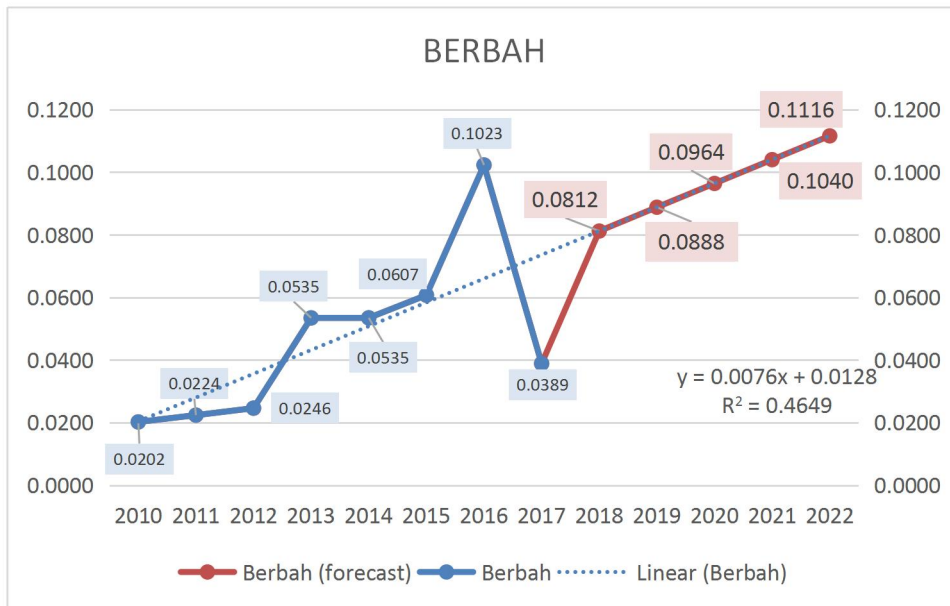


Gambar 4.43. Trend Ketimpangan Kecamatan Ngaglik

Kecamatan Ngaglik merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman dengan angka ketimpangan yang paling besar di Kabupaten Sleman namun mengalami trend penurunan. Pada tahun 2011 angka ketimpangan di Kecamatan Ngaglik sebesar 0,3075 mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 0,3555, namun mengalami kecenderungan menurun dengan angka 0,0111 pertahun. Diprediksikan pada tahun 2022, ketimpangannya berada pada angka 0.2113.

4.5.6.11. Trend Ketimpangan Kecamatan Berbah

Trend ketimpangan Kecamatan Berbah ditunjukkan oleh gambar 4.44 sebagai berikut:

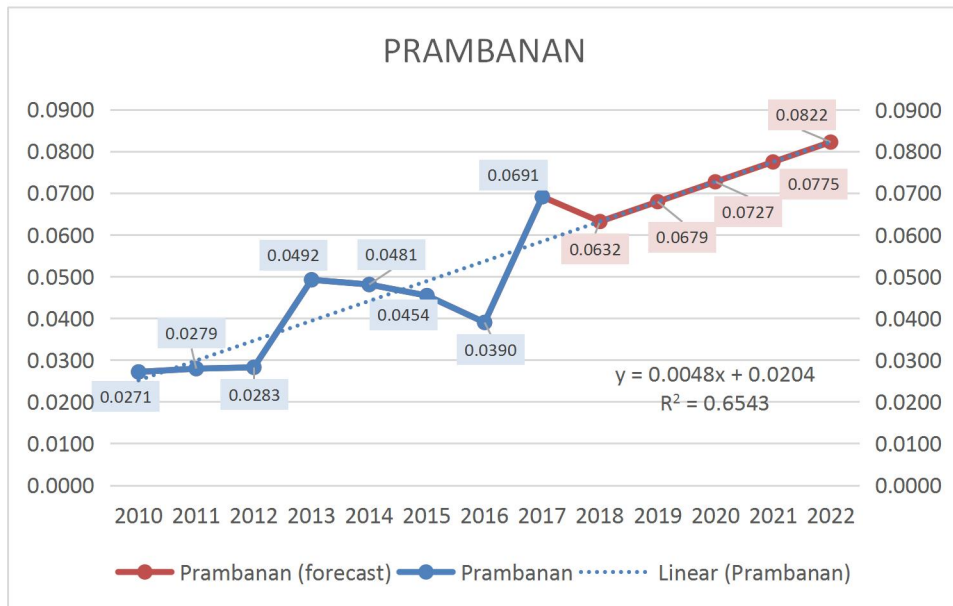


Gambar 4.44. Trend ketimpangan Kecamatan Berbah

Trend ketimpangan di Kecamatan Berbah cenderung naik. Besarnya angka ketimpangan di Kecamatan Berbah tahun 2011 sebesar 0,0224 diprediksikan akan mengalami kenaikan sebesar 0,0076 setiap tahun menjadi 0,1114 pada tahun 2022. Kenaikan angka ketimpangan di daerah ini mungkin disebabkan karena adanya bandara yang sebagian masuk wilayah Kecamatan Berbah dimana di sekitar bandara kegiatan ekonominya akan berkembang lebih cepat di banding tempat lain dalam kecamatan yang sama.

4.5.6.12. Trend Ketimpangan Kecamatan Prambanan

Trend ketimpangan Kecamatan Prambanan ditunjukkan oleh gambar 4.45 sebagai berikut:

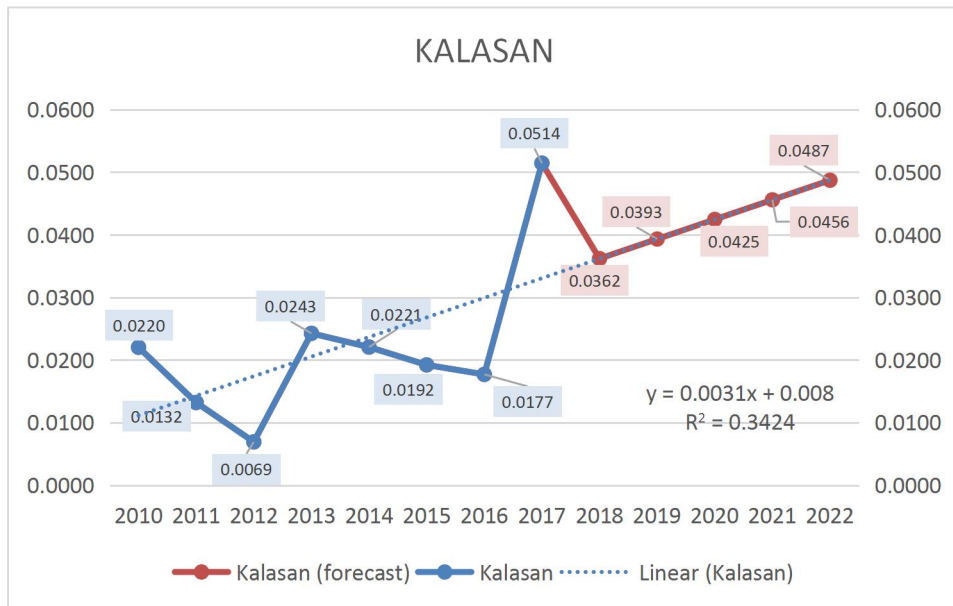


Gambar 4.45. Trend Ketimpangan Kecamatan Prambanan

Trend ketimpangan di Kecamatan Prambanan juga cenderung naik meskipun angka ketimpangannya tidak terlalu besar. Besarnya angka ketimpangan di Kecamatan Prambanan tahun 2011 adalah 0,0279 naik menjadi 0,0691 pada tahun 2017. Diprediksikan angka ketimpangan ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,005 setiap tahunnya menjadi 0,0842 pada tahun 2022.

4.5.6.13. Trend Ketimpangan Kecamatan Kalasan

Trend ketimpangan Kecamatan Kalasan ditunjukkan oleh gambar 4.45 sebagai berikut:

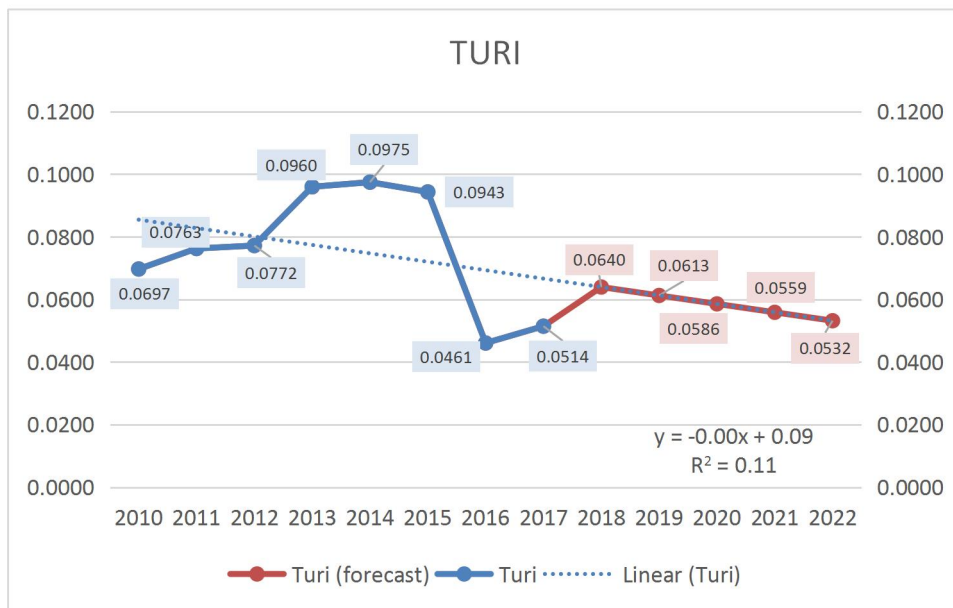


Gambar 4.45. Trend Ketimpangan Kecamatan Kalasan

Trend ketimpangan di Kecamatan Kalasan cenderung naik meskipun angka ketimpangannya fluktuatif, besarnya angka ketimpangan di Kecamatan Kalasan pada tahun 2011 adalah 0,0132 dan diprediksikan angka ketimpangan ini akan mengalami kenaikan sebesar 0,0047 setiap tahunnya menjadi 0,0596 pada tahun 2022.

4.5.6.14. Trend Ketimpangan Kecamatan Turi

Trend ketimpangan Kecamatan Turi ditunjukkan oleh gambar 4.46 sebagai berikut:

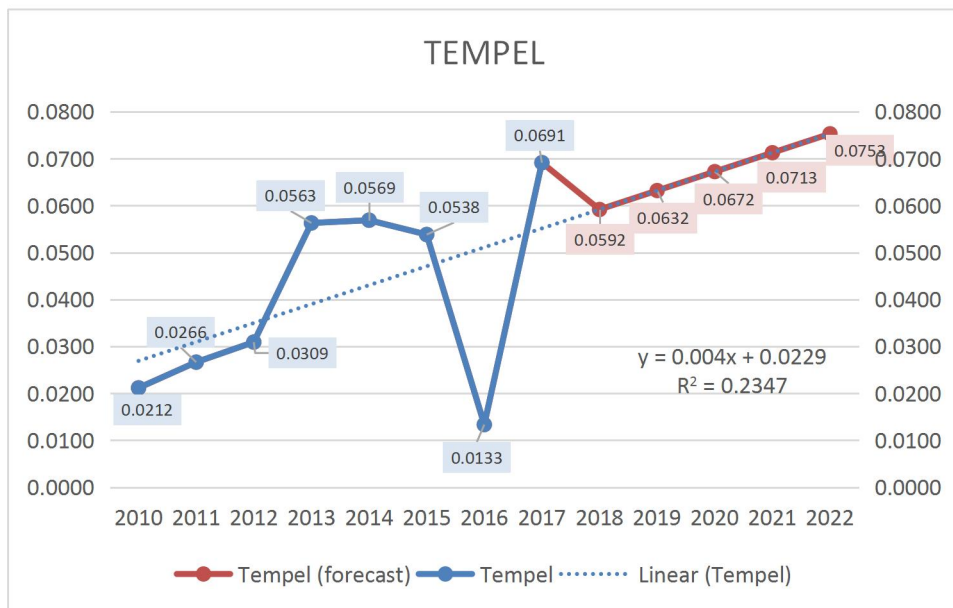


Gambar 4.46. Trend Ketimpangan Kecamatan Turi

Kecamatan Turi merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Sleman dengan angka ketimpangan yang cukup kecil dan mempunyai kecenderungan turun. Pada tahun 2011 angka ketimpangan sebesar 0,0763 naik cukup signifikan pada tahun 2014 menjadi 0,0975 dan turun di tahun-tahun berikutnya. Diprediksikan angka ketimpangan di Kecamatan Turi sebesar 0,0374 pada tahun 2022. Cenderung rendah dan menurunnya angka ketimpangan di Kecamatan Turi mungkin lebih disebabkan karena sebagian besar penduduk Turi berprofesi sebagai Petani salak dengan luas lahan yang relatif sama sehingga pendapatan mereka tidak terlalu signifikan perbedaannya

4.5.6.15. Trend Ketimpangan Kecamatan Tempel

Trend ketimpangan Kecamatan Turi dapat dilihat pada gambar 4.47 sebagai berikut:

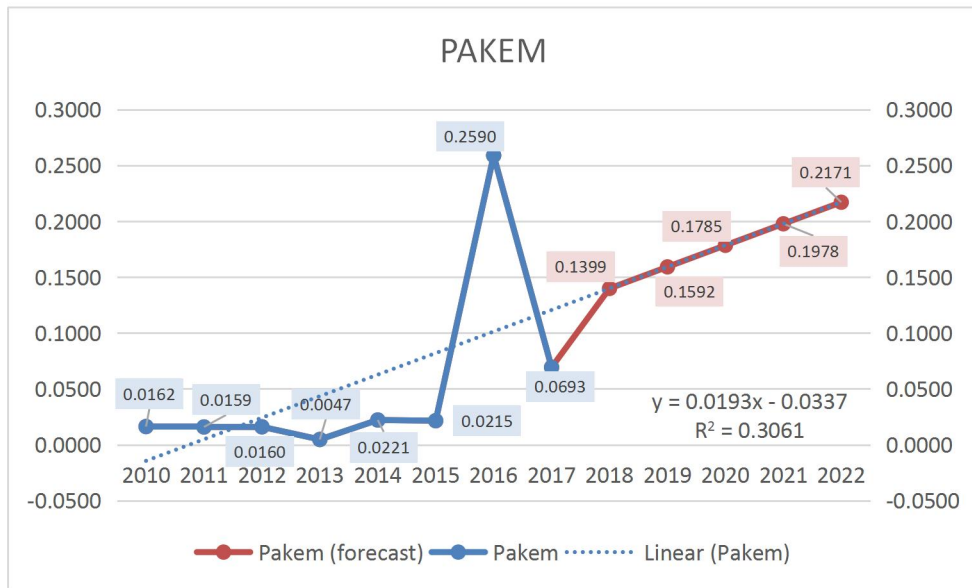


Gambar 4.47. Trend Ketimpangan Kecamatan Tempel

Trend ketimpangan di Kecamatan Tempel pada tahun 2011 sebesar 0,0266, turun menjadi 0,0133 pada tahun 2016 akan tetapi kembali naik pada tahun-tahun berikutnya. Angka ini diprediksikan akan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya sebesar 0,0032 menjadi 0,0695 pada tahun 2022.

4.5.6.16. Trend Ketimpangan Kecamatan Pakem

Trend ketimpangan Kecamatan Pakem ditunjukkan oleh gambar 4.48. sebagai berikut:

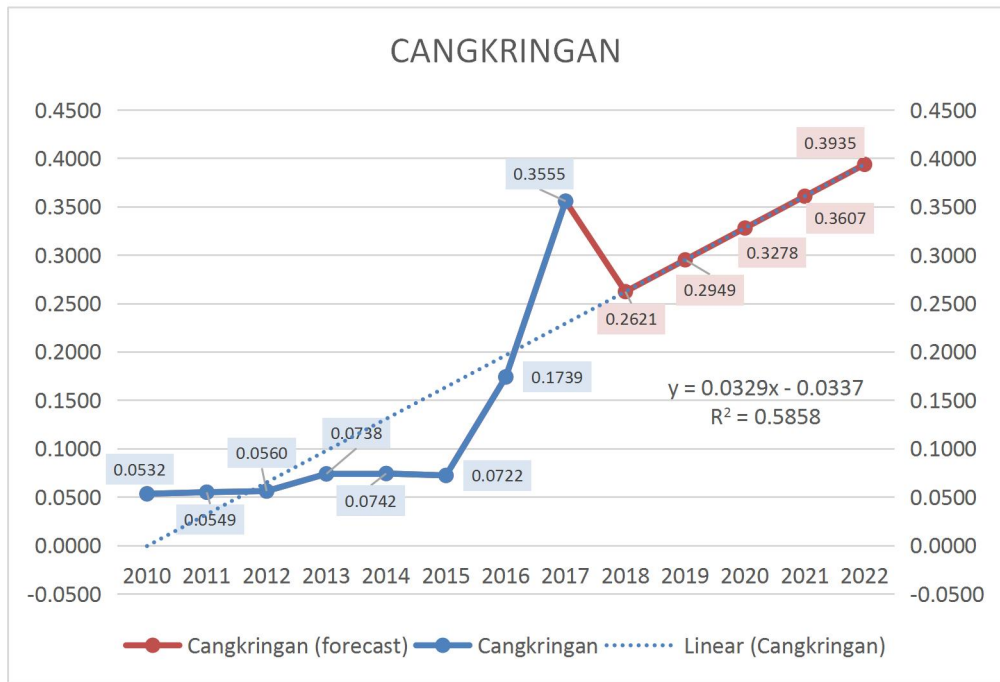


Gambar 4.48. Trend Ketimpangan Kecamatan Pakem

Trend ketimpangan di Kecamatan Pakem yang merupakan salah satu kawasan Utara di Kecamatan Sleman diproyeksikan mengalami kenaikan. Tercatat pada tahun 2011 angka ketimpangan di Kecamatan Pakem sebesar 0,0159, jika setiap tahunnya diprediksikan naik sebesar 0,0237 maka angka ketimpangan di Kecamatan Pakem sebesar 0,02479 pada tahun 2022.

4.5.6.17. Trend Ketimpangan Kecamatan Cangkringan

Trend ketimpangan Kecamatan Cangkringan ditunjukkan oleh gambar 4. 49 sebagai berikut:

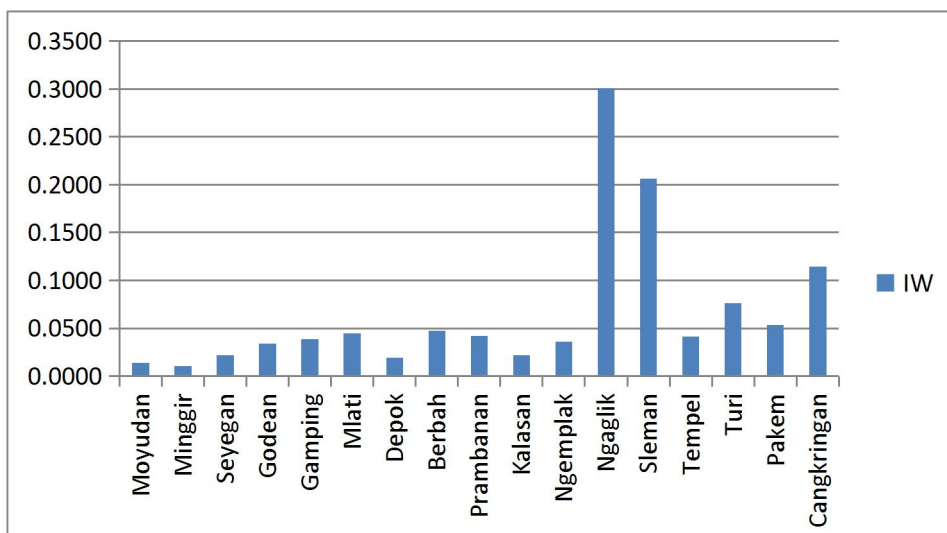


Gambar 4.49. Trend Ketimpangan Kecamatan Cangkringan

Kecamatan Cangkringan juga merupakan salah satu kecamatan dengan angka ketimpangan yang cenderung mengalami kenaikan. Diprediksikan tiap tahunnya ketimpangan di Kecamatan Cangkringan mengalami kenaikan sebesar 0,0406 sehingga pada tahun 2022 angka ketimpangan di Kecamatan Cangkringan diprediksi cukup besar yaitu 0,4475

4.6. Faktor Penyebab Ketimpangan Antar Wilayah

Berdasarkan perhitungan angka ketimpangan yang sudah dilakukan, terdapat perbedaan terhadap angka ketimpangan pada tiap wilayah kecamatan. Rerata ketimpangan per kecamatan di Kabupaten Sleman ditunjukkan oleh gambar 4.50 berikut.



Sumber : Hasil Analisis, lampiran

Gambar 4.50. Rerata Ketimpangan Per Kecamatan di Kabupaten Sleman Tahun 2011-2017

Berdasarkan gambar 4.50 dapat dilihat bahwa secara rerata sejak tahun 2011 hingga tahun 2017, tiga kecamatan dengan ketimpangan tertinggi di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, dan Kecamatan Cangkringan. Dua kecamatan yaitu Kecamatan Ngaglik dan Sleman berada di wilayah tengah Kabupaten Sleman yang termasuk dalam Aglomerasi Perkotaan Yogyakarta (APY) dengan tingkat konsentrasi ekonomi terpusat yang tinggi sehingga sangat dimungkinkan angka ketimpangan yang cukup tinggi di wilayah tersebut. Sedangkan untuk Kecamatan Cangkringan sendiri adalah kecamatan yang berada di kawasan bagian utara Kabupaten Sleman. Selanjutnya kecamatan dengan tingkat ketimpangan terendah di Kabupaten Sleman adalah Kecamatan Minggir, Kecamatan Moyudan,. Kecamatan Moyudan dan Minggir adalah kecamatan yang berada di kawasan barat Kabupaten Sleman yang memiliki angka ketimpangan terendah secara rerata. Kedua kecamatan tersebut adalah kecamatan dengan konsentrasi ekonomi yang begitu tidak terpusat pada salah satu sektor, sehingga angka ketimpangan cukup rendah.

Berdasarkan gambar 4.50 dapat diketahui bahwa wilayah kecamatan dengan ketimpangan tertinggi adaah kecamatan Ngaglik, Kecamatan Sleman, di ikuti dengan Kecamatan Cangkringan. Berdasarkan kondisi tersebut dapat di simpulkan penyebab ketimpangan di Kabupaten Sleman adalah masih terpusatnya (terkonsentrasinya) kegiatan ekonomi pada suatu wilayah tertentu, yang menyebabkan alokasi dan persebaran ekonomi kurang merata misalnya:

1. Berdasarkan kajian Bappeda Sleman (2015), salah satu desa yang dianggap menjadi penyebab terjadinya ketimpangan yang tinggi di wilayah Kecamatan Ngaglik adalah Desa Donoharjo, meskipun angka ketimpangannya tidak terlalu besar. Desa Donoharjo relatif masih sepi, dibandingkan dengan desa lainnya yang dilewati oleh jalan provinsi yang merupakan jalur utama destinasi wisata. Namun demikian di Desa Donoharjo masih tersedia banyak lahan pertanian yang sangat luas.
2. Kecamatan Sleman merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sleman dengan angka ketimpangan cukup besar (nomor 2 setelah Kecamatan Ngaglik). Sebagai pusat pemerintahan, dan juga pusat kegiatan ekonomi karena beberapa hotel dan pusat perbelanjaan ada di wilayah Kecamatan Sleman. Banyaknya pegawai pemerintahan yang berasal dari luar Kecamatan Sleman akan tetapi tinggal di Kecamatan Sleman, sementara di sisi lain penduduk asli banyak yang hanya bekerja dan berusaha di sektor pertanian dan tinggal di wilayah pedesaan, membuat angka ketimpangan di wilayah ini cukup besar.
3. Kecamatan Cangkringan merupakan Kecamatan dengan angka yang cukup tinggi (nomer 3 sesudah Kecamatan Sleman), penyebab ketimpangan di Kecamatan Cangkringan adalah tidak meratanya investasi, misalnya wisata agro, wisata lereng Merapi dan hotel berbintang (The Cangkringan Jogja) semuanya berada di Desa Kepuharjo dan di Desa Glagaharjo terdapat pabrik PT. Sari Husada, sementara desa lain merupakan desa dengan pertanian yang masih kurang efektif.

4.7. Kebijakan Pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah

Upaya pengurangan ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman dapat dilakukan dengan:

1. Pemerataan investasi pada wilayah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah tersebut, misalnya wilayah di lereng Merapi dengan investasi di bidang agrowisata

2. Mengembangkan daya saing ekonomi lokal misalnya
 - a. Salah satu Desa yang dianggap menjadi penyebab adanya ketimpangan di Kecamatan Ngaglik adalah Desa Donoharjo, meskipun angka ketimpangannya tidak terlalu besar. Desa Donoharjo relatif masih sepi, namun demikian masih tersedia banyak lahan pertanian yang sangat luas. Agar angka ketimpangan bisa ditekan, perlu dilakukan upaya pengembangan yang intensif di wilayah Desa Donoharjo. Adapun yang dibutuhkan untuk wilayah Desa Donoharjo sendiri adalah sarana prasarana pertanian berupa teknologi dalam penggarapan sawah karena sulitnya mendapatkan tenaga kerja untuk *tandur* dan *ani-ani* sehingga dibutuhkan teknologi atau inovasi baru untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja tersebut. Di wilayah Desa Donoharjo tersebut terdapat banyak kelompok tani. Di wilayah Kecamatan Ngaglik juga berkembang potensi peternakan sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk membuat kompos dari limbah peternakan.
 - b. Kecamatan Berbah merupakan Kecamatan dengan trend ketimpangan naik, di wilayah Kecamatan Berbah sebenarnya banyak mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan. Misalnya di Desa Jogotirto yang menonjol adalah potensi wisatanya, yaitu ada wisata Lava Bantal, Gunung Tugel, dan Candi Abang. Wilayah lain yang juga berpotensi di Kecamatan Berbah adalah Desa Tegaltirto yang memiliki banyak potensi UMKM berupa kacang mete dan emping yang masih bisa dikembangkan, sedangkan untuk desa Sendangtirto potensinya adalah ikan air tawar dimana sudah ada pasar ikan yang akan menjadi ikon desa itu sendiri.
 - c. Selain Kecamatan Berbah, wilayah yang mempunyai trend ketimpangan naik adalah Kecamatan Prambanan. Beberapa upaya bisa dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan di Kecamatan Prambanan dengan

mengembangkan potensi wisata di Desa Gayamharjo. Potensi wisata di Desa tersebut diantaranya adalah potensi religi: Sendang Sriningsih, potensi pariwisata: Desa Nawung dimana desa ini menyuguhkan perjalanan wisata khas pedesaan dan makanan khas yang ada di pedesaan, wisata yang paling andalan adalah tracking sungai Kedung Nganten. Disana juga sudah dikembangkan paket-paket wisata yang dapat dinikmati para pengunjung seperti kesenian jathilan, kerajinan, wisata alam hijau, dll. Yang kedua adalah dengan mengembangkan potensi wisata di Desa Wukirharjo. Selain Desa Gayamharjo terdapat potensi pariwisata Desa Wukirharjo yaitu Wisata Curug Kembar, Bukit Watu Kansu, Gua SongKurang dan apabila potensi wisata ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan diharapkan akan ada pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, disampaikan kesimpulan sebagai berikut berikut:

1. Angka ketimpangan antar wilayah di Kabupaten Sleman mempunyai angka ketimpangan cukup tinggi yaitu 0,41 pada tahun 2017 namun mempunyai kecenderungan turun sampai 5 (lima) tahun kedepan.
2. Berdasarkan kawasan, Kawasan Sleman Tengah (KPY) mempunyai angka ketimpangan yang paling tinggi (0,1089), dibandingkan dengan 3 (tiga) kawasan lainnya yaitu Kawasan Barat (0,1088), Kawasan Utara (0,0755), dan Kawasan Timur (0,0389). Sementara itu berdasarkan wilayah kecamatan, kecamatan yang mempunyai angka ketimpangan paling tinggi adalah Kecamatan Ngaglik (0,3005) dan Kecamatan Sleman (0,2016). Wilayah Kecamatan yang diduga mempunyai trend ketimpangan naik pada 5 (lima) tahun kedepan

adalah Kecamatan Moyudan, Minggir, Gamping, Mlati, Depok, Ngemplak, Kalasan, Prambanan, Berbah, Pakem, dan Tempel.

6.2. Rekomendasi Kebijakan

Dalam upaya mengurangi ketimpangan antar wilayah kecamatan di Kabupaten Sleman maka diperlukan sebagai berikut:

1. Pemerataan investasi pada wilayah sesuai dengan karakteristik lokal wilayah tersebut, misalnya wilayah di lereng Merapi dengan investasi di bidang agrowisata.
2. Mengembangkan daya saing ekonomi lokal, misalnya
 - a. Salah satu desa yang dianggap menjadi penyebab adanya ketimpangan di Kecamatan Ngaglik adalah Desa Donoharjo, meskipun angka ketimpangannya tidak terlalu besar. Desa Donoharjo relatif masih sepi, namun demikian masih tersedia banyak lahan pertanian yang sangat luas. Agar angka ketimpangan bisa ditekan, perlu dilakukan upaya pengembangan yang intensif di wilayah Desa Donoharjo. Adapun yang dibutuhkan untuk wilayah Desa Donoharjo sendiri adalah sarana prasarana pertanian berupa teknologi dalam penggarapan sawah karena sulitnya mendapatkan tenaga kerja untuk *tandur* dan *ani-ani* sehingga dibutuhkan teknologi atau inovasi baru untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja tersebut. Di wilayah Desa Donoharjo tersebut terdapat banyak kelompok tani. Di wilayah Kecamatan Ngaglik juga berkembang potensi peternakan sehingga dibutuhkan pelatihan-pelatihan untuk membuat kompos dari limbah peternakan.
 - b. Kecamatan Berbah merupakan Kecamatan dengan trend ketimpangan naik, di wilayah Kecamatan Berbah sebenarnya banyak mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan. Misalnya di Desa Jogotirto yang menonjol adalah potensi wisatanya, yaitu Lava Bantal, Gunung Tugel, dan Candi Abang. Wilayah lain yang juga berpotensi di Kecamatan

Berbah adalah Desa Tegaltirto yang memiliki banyak potensi UMKM berupa kacang mete dan emping yang masih bisa dikembangkan, sedangkan untuk desa Sendangtirto potensinya adalah ikan air tawar dimana sudah ada pasar ikan yang akan menjadi ikon desa itu sendiri.

- c. Selain Kecamatan Berbah, wilayah yang mempunyai trend ketimpangan naik adalah Kecamatan Prambanan. Beberapa upaya bisa dilakukan dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan di Kecamatan Prambanan dengan mengembangkan potensi wisata di Desa Gayamharjo. Potensi wisata di Desa tersebut diantaranya adalah potensi religi: Sendang Sriningsih, potensi pariwisata: Desa Nawung dimana desa ini menyuguhkan perjalanan wisata khas pedesaan dan makanan khas yang ada di pedesaan, wisata yang paling andalan adalah tracking sungai Kedung Nganten. Disana juga sudah dikembangkan paket-paket wisata yang dapat dinikmati para pengunjung seperti kesenian jathilan, kerajinan, wisata alam hijau, dll. Yang kedua adalah dengan mengembangkan potensi wisata di Desa Wukirharjo. Selain Desa Gayamharjo terdapat potensi pariwisata Desa Wukirharjo yaitu Wisata Curug Kembar, Bukit Watu Kansi, Gua SongKurang dan apabila potensi wisata ini dapat dikembangkan secara berkelanjutan diharapkan akan ada pengembangan UMKM di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2002), *Pengantar Perencanaan Pembangunan*. BPF. Yogyakarta
- Arsyad, Lincoln (2010), *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Kelima. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Bappeda Kabupaten Sleman (2015), *Analisis Ketimpangan AntarWilayah Kecamatan di Kabupaten Sleman*, Laporan Penelitian, tidak dipublikasikan
- Jhingan, ML. (1994). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Rajawali Press. Jakarta
- Kuncoro, Mudjarat. (2006). *Ekonomi Pembangunan Daerah*. Penerbit Salemba Empat Jakarta:
- Sjafrizal (2012), *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Todaro, Michael P dan Smith Stephen C. (2004). *Ekonomi Pembangunan Dunia Ketiga*. Edisi 8, Erlangga, Jakarta

**LAMPIRAN 1. LAJU PDRB PER KECAMATAN
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI
TAHUN 2011 – 2017**

No	Kecamatan	Laju PDRB (%)							Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Moyudan	1.40	2.89	3.65	3.87	4.04	4.38	6.36	3.80
2	Minggir	3.63	4.25	5.11	4.50	3.95	4.43	9.25	5.02
3	Seyegan	2.72	5.31	5.55	4.35	4.66	4.67	6.69	4.85
4	Godean	3.56	6.08	6.38	5.44	2.06	-8.35	-3.61	1.65
5	Gamping	6.79	5.73	6.02	5.81	5.22	5.44	-1.46	4.79
6	Mlati	6.07	4.73	5.35	5.96	5.48	5.41	-2.04	4.42
7	Depok	7.24	6.99	6.97	7.86	6.70	5.75	5.99	6.79
8	Berbah	5.62	4.70	4.78	8.04	1.19	5.10	-0.71	4.10
9	Prambanan	4.61	5.74	6.18	5.33	4.82	4.67	0.92	4.61
10	Kalasan	2.96	3.38	6.22	8.13	6.19	3.22	-0.66	4.20
11	Ngemplak	4.53	5.60	5.78	5.09	4.97	-4.73	-0.66	2.94
12	Ngaglik	5.88	5.26	5.32	5.65	5.40	5.30	-1.99	4.40
13	Sleman	6.77	5.35	5.58	5.38	5.23	5.53	-0.32	4.79
14	Tempel	1.86	3.49	3.77	4.07	4.82	4.95	6.25	4.17
15	Turi	-1.05	5.40	5.46	2.98	5.28	5.03	7.06	4.31
16	Pakem	5.53	5.80	5.79	-2.34	4.10	4.79	-2.03	3.09
17	Cangkringan	3.90	5.03	5.20	4.39	4.53	4.06	5.55	4.67
Rerata		4.24	5.04	5.48	4.97	4.63	3.51	2.03	4.27
Kabupaten Sleman		5.42	5.79	5.89	5.30	5.18	5.25	5.35	5.46
STDEV		2.21	1.05	0.85	2.38	1.34	3.88	4.23	1.07

**LAMPIRAN 2. INDEKS WILLIAMSON PER KECAMATAN
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 – 2017**

No	Kecamatan	Indeks Williamson							Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Moyudan	0.0083	0.0044	0.0151	0.0135	0.0116	0.0108	0.0334	0.0139
2	Minggir	0.0061	0.0045	0.0117	0.0093	0.0074	0.0075	0.0298	0.0109
3	Seyegan	0.0355	0.0347	0.0128	0.0115	0.0129	0.0200	0.0060	0.0191
4	Godean	0.0443	0.0454	0.0190	0.0172	0.0614	0.0268	0.0049	0.0313
5	Gamping	0.0131	0.0134	0.0483	0.0526	0.0514	0.0418	0.0757	0.0423
6	Mlati	0.0168	0.0199	0.0575	0.0616	0.0598	0.0493	0.0757	0.0487
7	Depok	0.0056	0.0102	0.0278	0.0093	0.0029	0.0110	0.0817	0.0212
8	Berbah	0.0224	0.0246	0.0535	0.0535	0.0607	0.1023	0.0389	0.0508
9	Prambanan	0.0279	0.0283	0.0492	0.0481	0.0454	0.0390	0.0691	0.0439
10	Kalasan	0.0132	0.0069	0.0243	0.0221	0.0192	0.0177	0.0514	0.0221
11	Ngemplak	0.0147	0.0174	0.0448	0.0438	0.0445	0.0402	0.0693	0.0392
12	Ngaglik	0.3075	0.3098	0.3474	0.3527	0.3495	0.0808	0.3555	0.3005
13	Sleman	0.2398	0.2416	0.2688	0.2698	0.2655	0.0426	0.0833	0.2016
14	Tempel	0.0266	0.0309	0.0563	0.0569	0.0538	0.0133	0.0691	0.0439
15	Turi	0.0763	0.0772	0.0960	0.0975	0.0943	0.0461	0.0514	0.0770
16	Pakem	0.0159	0.0160	0.0047	0.0221	0.0215	0.2590	0.0693	0.0583
17	Cangkringan	0.0549	0.0560	0.0738	0.0742	0.0722	0.1739	0.3555	0.1229
Rerata		0.0546	0.0554	0.0712	0.0715	0.0726	0.0578	0.0894	0.0659
Kabupaten Sleman		0.4805	0.4781	0.3570	0.5530	0.4461	0.3915	0.4103	0.4452
STDEV		0.0854	0.0860	0.0934	0.0948	0.0932	0.0665	0.1031	0.0766

**LAMPIRAN 3: LAJU PDRB WILAYAH UTARA
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 - 2017**

No	Kecamatan	Laju PDRB (%)							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
1	Tempel	1.86	3.49	3.77	4.07	4.82	4.95	6.25	4.17
2	Turi	-1.05	5.40	5.46	2.98	5.28	5.03	7.06	4.31
3	Pakem	5.53	5.80	5.79	-2.34	4.10	4.79	-2.03	3.09
4	Cangkringan	3.90	5.03	5.20	4.39	4.53	4.06	5.55	4.67
Rerata		2.56	4.93	5.06	2.27	4.68	4.71	4.21	4.06

**LAMPIRAN 4: INDEKS WILLIAMSON WILAYAH UTARA
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 - 2017**

No	Kecamatan	Indeks Williamson							
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Rerata
1	Tempel	0.0266	0.0309	0.0563	0.0569	0.0538	0.0133	0.0691	0.0439
2	Turi	0.0763	0.0772	0.0960	0.0975	0.0943	0.0461	0.0514	0.0770
3	Pakem	0.0159	0.0160	0.0047	0.0221	0.0215	0.2590	0.0693	0.0583
4	Cangkringan	0.0549	0.0560	0.0738	0.0742	0.0722	0.1739	0.3555	0.1229
Rerata		0.0434	0.0450	0.0577	0.0627	0.0605	0.1231	0.1363	0.0755

**LAMPIRAN 5: LAJU PDRB WILAYAH TENGAH
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 – 2017**

No	Kecamatan	Laju PDRB (%)							Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Mlati	6.07	4.73	5.35	5.96	5.48	5.41	-2.04	4.42
2	Sleman	6.77	5.35	5.58	5.38	5.23	5.53	-0.32	4.79
3	Ngaglik	5.88	5.26	5.32	5.65	5.40	5.30	-1.99	4.40
4	Ngemplak	4.53	5.60	5.78	5.09	4.97	-4.73	-0.66	2.94
5	Depok	7.24	6.99	6.97	7.86	6.70	5.75	5.99	6.79
6	Gamping	6.79	5.73	6.02	5.81	5.22	5.44	-1.46	4.79
Rerata		6.21	5.61	5.84	5.96	5.50	3.78	-0.08	4.69

**LAMPIRAN 6: INDEKS WILLIAMSON WILAYAH TENGAH
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 - 2017**

No	Kecamatan	Indeks Williamson							Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Mlati	0.0168	0.0199	0.0575	0.0616	0.0598	0.0493	0.0757	0.0487
2	Sleman	0.2398	0.2416	0.2688	0.2698	0.2655	0.0426	0.0833	0.2016
3	Ngaglik	0.3075	0.3098	0.3474	0.3527	0.3495	0.0808	0.3555	0.3005
4	Ngemplak	0.0147	0.0174	0.0448	0.0438	0.0445	0.0402	0.0693	0.0392
5	Depok	0.0056	0.0102	0.0278	0.0093	0.0029	0.0110	0.0817	0.0212
6	Gamping	0.0131	0.0134	0.0483	0.0526	0.0514	0.0418	0.0757	0.0423
Rerata		0.0996	0.1020	0.1324	0.1316	0.1289	0.0443	0.1235	0.1089

**LAMPIRAN 7: LAJU PDRB WILAYAH BARAT
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 – 2017**

No	Kecamatan	Laju PDRB (%)							Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Godean	3.56	6.08	6.38	5.44	2.06	-8.35	-3.61	1.65
2	Minggir	3.63	4.25	5.11	4.50	3.95	4.43	9.25	5.02
3	Sayegan	2.72	5.31	5.55	4.35	4.66	4.67	6.69	4.85
4	Moyudan	1.40	2.89	3.65	3.87	4.04	4.38	6.36	3.80
Rerata		2.83	4.63	5.17	4.54	3.68	1.28	4.67	3.83

**LAMPIRAN 8: INDEKS WILLIAMSON WILAYAH BARAT
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 – 2017**

No	Kecamatan	Indeks Williamson							Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Godean	0.0443	0.0454	0.0190	0.0172	0.0614	0.0268	0.0049	0.0313
2	Minggir	0.0061	0.0045	0.0117	0.0093	0.0074	0.0075	0.0298	0.0109
3	Sayegan	0.0355	0.0347	0.0128	0.0115	0.0129	0.0200	0.0060	0.0191
4	Moyudan	0.0083	0.0044	0.0151	0.0135	0.0116	0.0108	0.0334	0.0139
Rerata		0.0236	0.0222	0.0147	0.0129	0.0233	0.0163	0.0185	0.0188

**LAMPIRAN 9: LAJU PDRB WILAYAH TIMUR
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 – 2017**

No	Kecamatan	Laju PDRB (%)							Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Prambanan	4.61	5.74	6.18	5.33	4.82	4.67	0.92	4.61
2	Kalasan	2.96	3.38	6.22	8.13	6.19	3.22	-0.66	4.20
3	Berbah	5.62	4.70	4.78	8.04	1.19	5.10	-0.71	4.10
Rerata		4.39	4.61	5.73	7.17	4.07	4.33	-0.15	4.31

**LAMPIRAN 10: INDEKS WILLIAMSON WILAYAH TIMUR
KABUPATEN SLEMAN DENGAN PENDEKATAN PROYEKSI TAHUN 2011 – 2017**

No	Kecamatan	Indeks Williamson							Rerata
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Prambanan	0.0279	0.0283	0.0492	0.0481	0.0454	0.0390	0.0691	0.0439
2	Kalasan	0.0132	0.0069	0.0243	0.0221	0.0192	0.0177	0.0514	0.0221
3	Berbah	0.0224	0.0246	0.0535	0.0535	0.0607	0.1023	0.0389	0.0508
Rerata		0.0212	0.0199	0.0423	0.0412	0.0418	0.0530	0.0532	0.0389



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Kantor Bupati Sleman, Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta
Kodepos 55511 Telepon: (0274) 868405 Faksimili: (0274) 868945
Laman: www.kominfo.slemankab.go.id Pos-el: kominfo@slemankab.go.id

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : //b/SPT.Kominfo/2018

Pertimbangan/Dasar : Keputusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9/1.02.10.01/Kep.Ka.BKAD/DPA-SKPD/2018 tanggal 14 Desember 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018;

Berdasarkan hal tersebut, maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

nama : EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si., M.Kom
jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman

MEMERINTAHKAN

kepada :

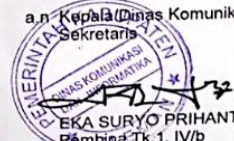
1. a. nama : Dr. Sri Suharsih, SE, M.Si
b. pekerjaan : Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta
2. a. nama : Asih Sri Winarti, SE, M.Si
b. pekerjaan : Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta
3. a. nama : Astuti Rahayu, SE, M.Si
b. pekerjaan : Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta

untuk melaksanakan tugas sebagai Narasumber Penyusunan Buku Indeks Williamson pada kegiatan Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan Statistik Daerah mulai bulan September sampai dengan Desember 2018

Demikian perintah ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Sleman, 3 September 2018

a.n Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Sekretaris



EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si., M.Kom
Pembina Tk.1, IV/b
NIP. 19680330 199803 1 003